



Daerah yang terletak paling ujung bagian pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 29 Km dengan dengan waktu tempuh kapal penyebrangan sekitar 2 jam sampai dengan 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 Km<sup>2</sup> dengan Kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982 (Peraturan Daerah Lampung Selatan, 2012), serta daerah ini terbagi atas 17 kecamatan yang selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan, seperti yang peneliti sarikan datanya pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Luas Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Nama Ibukota	Populasi	Luas
1	Natar	Merak Batin	191,8 ribu	250,88 km <sup>2</sup>
2	Jati Agung	Marga Agung	128,6 ribu	164,47 km <sup>2</sup>
3	Tanjung Bintang	Jati Baru	82,2 ribu	129,72 km <sup>2</sup>
4	Tanjung Sari	Kerto Sari	31,8 ribu	103,32 km <sup>2</sup>
5	Katibung	Tanjung Ratu	72,6 ribu	188,62 km <sup>2</sup>
6	Merbau Mataram	Merbau Mataram	56,5 ribu	113,94 km <sup>2</sup>
7	Way Sulan	Karang Pucung	24,3 ribu	46,54 km <sup>2</sup>
8	Sidomulyo	Sidorejo	65,3 ribu	158,99 km <sup>2</sup>
9	Candipuro	Titiwangi	57,6 ribu	84,90 km <sup>2</sup>
10	Way Panji	Sidoharjo	18,1 ribu	38,45 km <sup>2</sup>
11	Kalianda	Kalianda	94,1 ribu	179,82 km <sup>2</sup>
12	Rajabasa	Banding	24,8 ribu	100,39 km <sup>2</sup>
13	Palas	Bangunan	60,9 ribu	165,57 km <sup>2</sup>
14	Sragi	Kuala Sekampung	35,7 ribu	93,44 km <sup>2</sup>
15	Penengahan	Pasuruan	42,3 ribu	124,96 km <sup>2</sup>
16	Ketapang	Bangun Rejo	53,1 ribu	108,60 km <sup>2</sup>
17	Bakauheni	Hatta	24,5 ribu	57,13 km <sup>2</sup>
Jumlah			1.064,3 ribu	2.109,74 km <sup>2</sup>

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021a; Peraturan Daerah Lampung Selatan, 2012)

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 1.064.301 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 544.745 jiwa, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang sebesar 519.556 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Selatan mencapai 504 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jati Agung dan terendah di Kecamatan Rajabasa, dengan demikian konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Jati Agung. Hal ini dikarenakan Kecamatan Jati Agung memiliki akses yang mudah, dekat dengan Kota Bandar Lampung dan memiliki prasarana dan sarana yang cukup memadai.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020, Kabupaten Lampung Selatan memiliki indeks risiko multi ancaman bencana yang tinggi dengan skor 187.20. Multi ancaman bencana tersebut meliputi tsunami, gempabumi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim dengan indeks risiko tinggi, serta letusan gunungapi dengan indeks risiko sedang, sehingga kabupaten ini menempati urutan 41 daerah paling berisiko bencana dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

#### **4.1.2 Bencana Tsunami Selat Sunda**

Bencana tsunami selat sunda tahun 2018 terjadi pada tanggal 22 Desember 2018. Berdasarkan laporan BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM, tsunami ini disebabkan oleh longsoran bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau (Muhari et al., 2019; Heidarzadeh et al., 2020). Kronologi kejadian bencana tsunami selat sunda tahun 2018 seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Kronologi Kejadian Bencana**

No	Tanggal	Kronologi Kejadian
1	Jumat (21/12/2018) 07.00 WIB	BMKG memberi peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 22 Desember pukul 07.00 WIB hingga 25 Desember pukul 07.00 WIB di wilayah perairan Selat Sunda dengan ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter.
2	Jumat (21/12/2018) 13.51 WIB	Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mendeteksi erupsi Gunung Anak Krakatau. Ketinggian kolom abu sekitar 400 m di atas puncak dan 738 m di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal, condong kearah utara. Status Gunung adalah Waspada (Level II).
3	Sabtu (21/12/2018) 07.00 WIB	Peringatan dini gelombang tinggi berlaku dari 22 desember 2018 pukul 07.00 WIB hingga 25 Desember 2018 pukul 07.00 WIB berlaku di wilayah perairan Selat Sunda dengan Ketinggian gelombang 1,5 hingga 2,5 meter.
4	Sabtu (21/12/2018) 20.56 WIB	Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu longsor lereng Gunung seluas 64 Ha
5	Sabtu (21/12/2018) 21.03 WIB	Seismograf BMKG di Cigeulis Pandeglang (CGJ) dan beberapa sensor di wilayah Banten serta Lampung mencatat adanya getaran. Namun sistem prosesing otomatis gempa BMKG tak memproses secara otomatis karena sinyal getaran bukan berasal dari gempa tektonik.
6	Sabtu (21/12/2018) 21.10 WIB	Petugas Pusat Tsunami Selat Sunda dan Tsunami BMKG mendapat laporan kepanikan masyarakat wilayah Banten dan Lampung karena air laut pasang tidak normal. BMKG mengecek marigram Tide Gauge Badan Informasi Geospasial (BIG)
7	Sabtu (21/12/2018) 21.27 WIB	Lewat pengecekan itu dipastikan, ada perubahan permukaan air laut di sejumlah wilayah, yakni Pantai Jambu, Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Ketinggian muka air laut 0,9 m
8	Sabtu (21/12/2018) 21.35 WIB	Ketinggian permukaan air laut mencapai 0,35 m di pelabuhan Ciwandan, Banten
9	Sabtu (21/12/2018) 21.38 WIB	Ketinggian permukaan air laut mencapai 0,36 m di Kota Agung, Lampung
10	Sabtu (21/12/2018) 21.53 WIB	Ketinggian permukaan air laut mencapai 0,28 m di sejumlah kecamatan Kota Bandar Lampung
11	Sabtu (21/12/2018) pukul 22.30	BMKG meyakini bahwa yang terjadi itu adalah gelombang tsunami dan segera mengeluarkan rilis pers bahwa tsunami melanda Banten dan Lampung, namun tsunami tidak dipicu oleh gempa bumi tektonik.

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Informasi Kebencanaan Bulan Teraktual terkait tsunami selat sunda 22 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh BNPB, sampai dengan 31 Desember 2018, telah tercatat 437 orang meninggal, 16 orang menghilang, 14 ribu orang luka dan 33.719 orang mengungsi. Sementara itu, daerah yang terkena dampak tsunami selat sunda tersebut meliputi 6 kabupaten/kota, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran dan Bandar Lampung dengan wilayah terdampak paling parah akibat tsunami selat sunda adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lampung Selatan.

Oleh karena itu, untuk menangani dampak tsunami selat sunda di Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan masa tanggap darurat bencana tsunami selat sunda selama 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019. Seluruh tindakan yang dilakukan berupa evakuasi dan penyelamatan nyawa manusia dengan maksud untuk membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita.

#### **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

Penelitian terkait kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*) terhadap sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta menggunakan teknik observasi terhadap masyarakat penerima manfaat hunian tetap (hunatap) pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/375.1/VI.02/HK/2020 Tahun 2020 (Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2020).

Wawancara mendalam (*in-dept interview*) pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga pada penelitian ini yang berupa bagaimana strategi meningkatkan kapasitas

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Program Pemulihan Pascabencana Tsunami Guna Mewujudkan Ketahanan Daerah.

Wawancara mendalam (*in-dept interview*) tersebut dilakukan dengan cara mewawancarai sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, dan Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang berupa observasi atau pengamatan pada penelitian ini dilakukan guna memaksimalkan kapasitas peneliti dari segi data atau informasi yang memungkinkan peneliti memahami objek dengan menangkap fenomena lain dari sudut pandang subjek penelitian. Observasi menjadikan seorang peneliti dapat memahami apa yang dipahami oleh subjek penelitian sehingga menjadikan peneliti bisa menjadi sumber data berdasarkan pedoman yang dibuat.

Kriteria pengamatan dari narasumber menggunakan pedoman observasi sesuai dengan pedoman *check list* yang telah disiapkan peneliti. observasi yang dilakukan secara langsung pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dan kedua, yaitu bagaimana kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 dan bagaimana kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018.

#### **4.2.1 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018**

Hasil pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 menggunakan teknik observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat hunian tetap (hunatap) pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/375.1/VI.02/HK/2020 Tahun 2020 (Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2020) menggunakan bantuan pedoman observasi.

Pedoman observasi yang terkait dengan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 terdiri atas 2 sub sektor yaitu sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan. Data yang berhasil dikumpulkan peneliti melalui teknik observasi terkait kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel yang bisa dibaca melalui Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

**Tabel 4.3 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Perumahan Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Perumahan	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Bagaimana status kepemilikan rumah/tempat tinggal? <i>Skor: 1) menumpang atau diminta menempati (pemilik bukan org tua/mertua); 2) sewa/kontrak; 3) milik orang tua/mertua; 4) milik sendiri</i>	3,74	1,70	1,07	1,24	3,79
2	Berapa luas bangunan rumah (dalam m <sup>2</sup> )? <i>Skor: 1) kurang dari 36m<sup>2</sup>, 2) kurang dr 45m<sup>2</sup>, 3) kurang dr 54m<sup>2</sup>, 4) lebih dr 54m<sup>2</sup></i>	3,77	1,73	1,16	1,20	2,00
3	Berapa luas total lahan (rumah dan pekarangan) (dalam m <sup>2</sup> )? <i>Skor: 1) kurang dari 36m<sup>2</sup>, 2) kurang dr 45m<sup>2</sup>, 3) kurang dr 54m<sup>2</sup>, 4) lebih dr 54m<sup>2</sup></i>	3,69	1,50	1,14	1,16	4,00
4	Bagaimana kondisi atap bangunan rumah/tempat tinggal? <i>Skor: 1) ijuk/rumbiah/tenda; 2) asbes/seng; 3) genteng; 4) beton</i>	2,79	2,05	2,07	2,11	2,37
5	Bagaimana kondisi dinding bangunan rumah/tempat tinggal? <i>Skor: 1) bilik/anyaman bamboo/tenda; 2) triplek/papan kayu; 3) bata merah/batu kapur tanpa aci; 4) tembok</i>	2,87	2,32	2,15	2,11	3,86
6	Bagaimana kondisi lantai bangunan rumah/tempat tinggal? <i>Skor: 1) tanah; 2) kayu/semem; 3) tegel/keramik; 4) geranit/marmer</i>	2,50	1,96	1,97	1,92	2,22
7	Bagaimana keberfungsian rumah/tempat tinggal? <i>Skor: 1) rusak, tidak bisa ditinggali, 2) sudah banyak yang rusak, tapi masih bisa ditinggali; 3) hanya rusak sedikit, sehingga bisa ditinggali, 4) tidak ada yang rusak, berfungsi dengan baik</i>	3,91	1,27	1,29	1,75	3,96
8	Bagaimana aktivitas dan kondisi sarana MCK anggota keluarga? <i>Skor: 1) di sungai/waduk/ladang/kebun; 2) di kamar mandi/toilet bersama; 3) di kamar mandi milik sendiri, bangunan bukan tembok; 4) di kamar mandi milik sendiri, bangunan tembok</i>	2,75	2,05	2,07	2,34	3,80
9	Di mana tempat pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci? <i>Skor: 1) dibuang langsung ke sungai/ selokan/ saluran drainase; 2) dibuang ke lahan/ lubang terbuka; 3) dibuang ke septictank bersama/ umum, bangunan permanen dan tertutup 4) dibuang ke septictank milik sendiri, bangunan permanen dan tertutup</i>	2,24	2,26	2,27	2,13	2,78

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.4 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Prasarana Lingkungan Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Bagaimana kondisi drainase/selokan di sekitar rumah? <i>Skor: 1) tidak ada; 2) ada, bukan tembok; 3) ada, tembok dan sebagian besar rusak; 4) ada, tembok dan sebagian besar berfungsi dengan baik</i>	2,68	1,51	1,64	1,73	3,61
2	Apakah dalam satu RW/dusun/kampung terdapat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah rumah tangga? <i>Skor: 1) tidak ada; 2) ada, tidak difungsikan; 3) ada, difungsikan tetapi tidak terawat; 4) ada, difungsikan dan terawat</i>	1,13	1,17	1,28	1,30	1,34
3	Bagaimana kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di RT setempat? <i>Skor: 1) tidak ada; 2) ada, sebagian besar lampu mati/rusak; 3) ada, sebagian kecil lampu mati/rusak; 4) ada, hampir/semua lampu menyala</i>	2,18	1,90	2,02	2,76	3,39

Sumber: Diolah oleh peneliti.

#### **4.2.2 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018**

Pedoman observasi yang terkait dengan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 terdiri atas 8 sub sektor yaitu sub sektor pertanian, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan dan kelautan, sub sektor perdagangan, sub sektor koperasi dan ukm, sub sektor perindustrian, sub sektor pariwisata, hotel dan restoran, dan sub sektor informal lainnya. Data yang berhasil dikumpulkan peneliti melalui teknik observasi terkait kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel yang bisa dibaca lebih lengkap dalam Tabel 4.5 sampai dengan Tabel 4.12.

**Tabel 4.5 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Pertanian Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Pertanian	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Berapa luas lahan pertanian (dapat berupa sawah/ladang/kebun) yang digarap/dikelolah kepala/anggota keluarga? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) kurang dari 0,5 hektar, 3) kurang dari 2 hektar, 4) lebih dari 2 hektar</i>	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
2	Bagaimana status kepemilikan lahan pertanian yang digarap? <i>Skor: 1) petani penggarap (bagi hasil); 2) sewa/kontrak; 3) milik orang tua/mertua; 4) milik sendiri</i>	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
3	Bagaimana kondisi saluran irigasi lahan pertanian? <i>Skor: 1) tidak ada/rusak, 2) berupa galian tanah/parit, 3) sebagian kecil ditembok, 4) sebagian besar ditembok</i>	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
4	Selama berapa bulan air tersedia untuk pengairan lahan pertanian dalam waktu 1 tahun? <i>Skor: 1) kurang dari 3 bulan, 2) kurang dari 6 bulan, 3) kurang dari 9 bulan, 4) lebih dari 9 bulan</i>	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
5	Berapa jenis tanaman/komoditas yang biasanya ditanam dalam setahun (khusus lahan garapan yang dihandalkan keluarga)? <i>Skor: 1) tidak menanam, 2) 1 jenis, 3) 2-3 jenis, 4) lebih dari 3 jenis</i>	2,24	1,35	1,76	2,29	2,35
6	Berapa kali panen dalam setahun untuk total lahan garapan? (Jika lebih dari 1 jenis lahan garapan, maka jumlahkan frekuensi panen dalam satu tahun) <i>Skor: 1) tidak panen, 2) menurun, 3) relatif tetap/sama, 4) meningkat</i>	2,82	1,41	1,82	2,88	3,00
7	Berapa pendapatan dari hasil usaha pertanian dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	2,00	1,41	1,47	2,00	2,29

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.6 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Peternakan Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Peternakan	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Apakah kepala atau anggota keluarga mengelolah usaha ternak? <i>Skor: 1) tidak punya; 2) reptile/serangga/unggas (ayam, bebek, burung); 3) kambing/domba; 4) sapi/kerbau/kuda</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Bagaimana perkembangan jumlah/populasi hewan ternak yang dimiliki keluarga dibandingkan sebelum bencana? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) berkurang, 3) sama (sebagai titik awal kepemilikan), 4) bertambah</i>	3,00	2,00	2,00	3,60	4,00
3	Bagaimana perkembangan luas kandang hewan ternak? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) berkurang, 3) sama, 4) lebih luas/bertambah</i>	3,00	2,00	2,00	2,40	2,80
4	Bagaimana perkembangan penjualan hewan ternak dibanding sebelum bencana? <i>Skor: 1) tidak menjual, 2) berkurang, 3) sama, 4) meningkat</i>	3,00	2,00	2,00	2,00	4,00
5	Berapa rata-rata pendapatan keluarga dari hasil usaha peternakan dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	3,00	1,40	2,20	2,80	2,60

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.7 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Informal Lainnya Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Informal Lainnya	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Berapa hari kepala keluarga/anggota keluarga bekerja di sektor informal dalam sebulan? (misalnya buruh bangunan, pedagang kaki lima, atau buruh harian lainnya). <i>Skor: 1) tidak bekerja, 2) kurang dari 10 hari, 3) kurang dari 20 hari, 4) lebih dari 20 hari</i>	3,62	1,19	3,05	3,19	3,62
2	Berapa rata-rata pendapatan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya dari sektor informal dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta.</i>	2,50	1,33	2,42	2,63	2,67
3	Berapa pendapatan yang diperoleh anggota rumah tangga dari dana program bantuan pemerintah? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	1,57	2,00	2,00	2,00	1,64

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.8 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Perikanan dan Kelautan	$\bar{X}$	$\bar{X}$	$\bar{X}$	$\bar{X}$	$\bar{X}$
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Berapa luas lahan/area atau tempat yang dikelola untuk usaha perikanan? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) kurang dari 0,5 hektar, 3) kurang dari 2 hektar, 4) lebih dari 2 hektar</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Bagaimana status kepemilikan lahan/area/tempat untuk usaha perikanan tsb? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) sewa/kontrak/bagi hasil, 3) milik orang tua/keluarga, 4) milik sendiri</i>	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67
3	Biasanya berapa kali panen dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak panen, 2) panen lebih dari setahun, 3) 1-3 kali, 4) lebih dari 3 kali</i>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Berapa rata-rata pendapatan keluarga dari hasil usaha perikanan dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	2,21	1,29	2,00	2,21	2,29
5	Bagaimana status kepemilikan perahu/kapal? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) sewa/kontrak/bagi hasil, 3) milik orang tua/keluarga, 4) milik sendiri</i>	3,73	3,18	3,32	3,73	3,73
6	Berapa jarak terjauh menangkap ikan? <i>Skor: 1) tidak menangkap ikan, 2) lebih dari 10km, 3) kurang dari 10km, 4) kurang dari 5km</i>	2,59	1,27	2,27	2,59	2,59
7	Berapa rata-rata pendapatan keluarga sebagai nelayan/usaha perikanan tangkap dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	2,00	1,23	1,73	2,00	2,05
8	Berapa rata-rata pendapatan dari sektor budidaya laut di luar usaha perikanan tangkap ? (misalnya usaha tambak garam, rumput laut, pengolahan ikan, dll.) <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	1,17	1,00	1,17	1,17	1,17
9	Bagaimana perkembangan hasil usaha perikanan tangkap maupun usaha budidaya laut dibandingkan sebelum terjadi bencana? <i>Skor: 1) tidak menangkap ikan, 2) menurun, 3) sama saja, 4) meningkat</i>	2,54	1,62	2,00	2,92	3,23

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.9 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Perdagangan Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Perdagangan	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Bagaimana mendapatkan bahan kebutuhan pokok (beras) dibanding sebelum bencana? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) lebih jauh/sulit, 3) relatif sama, 4) lebih mudah/dekat</i>	3,77	2,23	2,38	2,46	3,92
2	Bagaimana harga bahan kebutuhan pokok (berupa beras) dibanding sebelum bencana? <i>Skor: 1) jauh lebih mahal, 2) lebih mahal, 3) relatif sama, 4) lebih murah</i>	2,92	2,85	2,77	2,85	2,85
3	Bagaimana jam operasional atau buka toko/kios? <i>Skor: 1) tidak/belum buka/tutup; 2) pagi sampai siang hari; 3) pagi sampai sore hari/malam sampai pagi hari 4) pagi sampai malam hari, atau malam sampai pagi menjelang siang hari</i>	2,31	1,23	1,62	2,00	2,77
4	Berapa hari tempat usaha buka dalam seminggu? <i>Skor: 1) tidak/belum buka/tutup, 2) 1-3 hari, 3) 4-6 hari, 4) 7 hari</i>	3,85	1,15	1,69	2,08	3,85
5	Bagaimana perkembangan jenis barang yang diperdagangkan setelah bencana? <i>Skor: 1) tidak berdagang, 2) menurun, 3) sama, 4) meningkat</i>	2,92	1,38	1,92	2,15	3,15
6	Apakah pernah mengalami kelangkaan memperoleh barang dagangan? <i>Skor: 1) tidak berdagang, 2) banyak jenis barang langka, 3) barang tertentu langka, 4) tidak pernah</i>	3,69	1,62	1,85	2,31	3,38
7	Berapa rata-rata pendapatan dari usaha perdagangan dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 25 juta, 3) kurang dari 50 juta, 4) di atas 50 juta.</i>	2,15	1,23	1,38	1,77	2,15

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.10 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Koperasi dan UKM Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Koperasi dan UKM	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Berapa jam operasional usaha dalam 1 hari? <i>Skor: 1) tidak/belum buka/tutup, 2) kurang dari 4 jam, 3) kurang dari 7 jam, 4) lebih dari 7 jam</i>	3,50	2,50	3,50	3,50	3,50
2	Berapa hari beroperasi/buka dalam seminggu? <i>Skor: 1) tidak/belum buka/tutup, 2) 1-3 hari, 3) 4-6 hari, 4) 7 hari</i>	3,50	2,50	3,50	3,50	3,50
3	Berapa jumlah karyawan? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 5 org, 3) kurang dari 10 org, 4) lebih dari 10 org</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Bagaimana perkembangan jenis barang yang dikelola/diproduksi setelah bencana? <i>Skor: 1) tidak berdagang/berproduksi, 2) menurun, 3) sama, 4) meningkat</i>	3,00	2,00	2,50	2,50	3,50
5	Bagaimana status mesin produksi utama yang digunakan? <i>Skor: 1) tidak punya, 2) meminjam/bagian dari kerjasama, 3) bantuan/sumbangan, 4) milik sendiri</i>	3,00	2,20	2,60	3,00	3,20
6	Berapa rata-rata pendapatan dari usaha koperasi/UKM dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 50 juta, 3) kurang dari 100 juta, 4) di atas 100 juta.</i>	2,50	1,50	2,00	2,00	2,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.11 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Pariwisata, Hotel, dan Restoran Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Pariwisata, Hotel, dan Restoran	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Berapa hari kerja per minggu? <i>Skor: 1) tidak/belum bekerja, 2) 1-3 hari, 3) 4-6 hari, 4) 7 hari</i>	3,33	1,17	2,50	3,00	3,50
2	Bagaimana perkembangan usaha (pendapatan usaha) dibanding sebelum terjadi bencana? <i>Skor: 1) tidak ada/belum buka usaha, 2) menurun, 3) relatif sama, 4) meningkat</i>	3,00	1,17	2,33	2,33	3,17
3	Berapa rata-rata pendapatan sebagai pekerja di sektor pariwisata,/hotel/restoran dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	3,00	1,33	2,50	2,83	3,33

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Tabel 4.12 Hasil Pengumpulan Data Pada Sub Sektor Perindustrian Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Sub Sektor Perindustrian	$\bar{X}$ 2017	$\bar{X}$ 2018	$\bar{X}$ 2019	$\bar{X}$ 2020	$\bar{X}$ 2021
1	Berapa jam operasional usaha dalam sehari? <i>Skor: 1) tidak/belum buka/tutup, 2) kurang dari 4 jam, 3) kurang dari 7 jam, 4) lebih dari 7 jam</i>	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00
2	Berapa hari usaha beroperasi dalam seminggu? <i>Skor: 1) tidak/belum buka/tutup, 2) 1-3 hari, 3) 4-6 hari, 4) 7 hari</i>	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00
3	Bagaimana kondisi peralatan/mesin produksi sebelum terjadi bencana? <i>Skor: 1) belum/tidak memproduksi, 2) menurun, 3)relativ sama, 4) meningkat</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Bagaimana perkembangan kapasitas produksi sebelum terjadi bencana? <i>Skor: 1) belum/tidak memproduksi, 2) menurun, 3) relative sama, 4) meningkat</i>	3,00	1,00	4,00	4,00	4,00
5	Secara umum bagaimana perkembangan pendapatan usaha sebelum terjadi bencana? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) menurun, 3) relative sama, 4) meningkat</i>	3,00	1,00	4,00	4,00	4,00
6	Bagaimana jarak dari rumah ke tempat kerja (kantor/pabrik) setelah terjadinya bencana ? <i>Skor: 1) tidak /belum bekerja kembali, 2) lebih jauh, 3) relative sama, 4) lebih dekat</i>	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00
7	Berapa rata-rata pendapatan sebagai pekerja/buruh pabrik dalam setahun? <i>Skor: 1) tidak ada, 2) kurang dari 10 juta, 3) kurang dari 25 juta, 4) di atas 25 juta</i>	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Bagaimana perkembangan pendapatan sebagai buruh pabrik/karyawan dibanding sebelum terjadi bencana? <i>Skor: 1) tidak ad/belum bekerja kembali, 2) menurun, 3) relative sama, 4) meningkat</i>	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

#### **4.2.3 Strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah**

Selain data yang didapatkan melalui teknik observasi di atas, didapatkan pula data hasil wawancara kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Selatan yang peneliti gunakan dalam menjawab rumusan dan tujuan masalah ketiga yang berupa strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah, Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Lampung Selatan yang dilakukan secara tatap muka pada 23 Agustus 2021 diperoleh keterangan terkait sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pascabencana dan pemulihan penghidupan masyarakat pascabencana, baik atas dukungan pemerintah dan pemerintah daerah maupun swadaya atau pihak lain dengan menyatakan informasinya sebagai berikut:

Kejadian tsunami selat sunda itu terjadi tahun 2018, pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan Tahun Anggaran 2019-2020. Ketika menghitung jitungasna, pertama yang dilakukan adalah identifikasi kerusakan dan kerugian, misal jalan rusak sekian kilometer, itu merupakan kerusakannya, untuk kerugiannya adalah jika jalan tersebut tidak berfungsi sekian lama, maka didapatkan berapa kerugian masyarakat,

Contoh lainnya pada sub sektor perikanan, perahu yang hilang misal 90 unit, misal jika 1 perahunya bernilai 2 juta, berarti 180 juta itu adalah kerusakan, dan kerugiannya adalah misal dalam waktu 3 bulan nelayan tidak bisa melaut, dengan hitungan rata-rata perhari dia dapat berapa, perbulan dapat berapa, kemudian dikalikan 3 bulan, itu kerugiannya, itu yang kita hitung.

Setelah perhitungan kerusakan dan kerugian, langkah selanjutnya adalah kita bagi kewenangan, jika jalan itu adalah kewenangan nasional maka kerusakan dan kerugian ini akan di rehabilitasi dan di rekonstruksi melalui usulkan melalui APBN, jika kewenangan provinsi maka kita usulkan melalui APBD Provinsi, terkait dengan yang menjadi kewenangan kita, maka kita masukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun selanjutnya.

Hal ini berkesesuaian dengan yang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Selatan yang diwakili Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Zulvina pada wawancara yang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 31 Agustus 2021 yang menyampaikan informasinya terkait mekanisme atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pascabencana dan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban sebagai berikut :

Pada saat terjadinya bencana 2018, dokumen RKPD kan sudah jadi, untuk memfasilitasi terkait hal tersebut maka akhirnya ada yang namanya APBD Perubahan, melalui APBD perubahan ini, yang menjadi tanggung jawab kabupaten, kita anggarkan, namun secara kapasitas anggaran, kita tidak bisa langsung merehabilitasi dan merekonstruksi secara menyeluruh, oleh karena itu, kita coba usulkan melalui beberapa pihak dan akhirnya kita coba cari lewat kementerian maupun pihak swasta.

Misalnya terkait perahu dan tempat pelelangan ikan kita minta ke Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat DAK di tahun berikutnya, pemulihan ekonomi ada yang memakai dana CSR perusahaan, ada dana dari pemda lain di BPKAD, bantuan hunian tetap di biayai oleh BNPB, dengan catatan pengaladaan lahan menjadi tanggung jawab kabupaten.

Informasi lebih lanjut terkait rancangan proses perbaikan rumah penduduk pascabencana dan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (*slow onset*) dari pembangunan. Informasi tersebut di dapatkan melalui Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Zulvina pada wawancara yang dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut :

Terkait perencanaan dan anggaran daerah, kami memastikan bagaimana dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu terintegrasi dengan dokumen RKPD di Kabupaten, item-item yang ada di dalam dokumen RR itu terintegrasi dengan renjanya OPD.

Artinya ketika pasca tsunami itu kita mendata dan melaksanakan APBD Perubahannya. Kendalanya adalah tsunami ini merupakan pengalaman pertama buat Lampung Selatan untuk menyusun dokumen RR, jadi kapasitas kita, kapasitas temen temen perencanaan, itu istilahnya belum optimal dalam menentukan kerusakan kerugian segalamacem itu ya, misal kita dan temen-temen BPBD saat ke lapangan, kita tidak tahu apa saja yang harus dilakukan, dan pada tahun itulah kita baru mendapatkan akselesari, jadi betul-betul dibimbing oleh BNPB untuk bisa megnhitung itu semua, seperti apa kerusakan dan kerugiannya, dan itu semua pengalaman pertama.

Masalah yang kedua adalah masalah koordinasi, koordinasi itu mudah diucapkan ya, tapi pada tahap pelaksanaannya itu agak sulit juga, karena itukan banyak OPD yang mau tidak mau harus bekerja bersama, ada kalanya sering tidak nyambung, inikan di akhir tahun, lagi sibuk sibuknya, disela-sela kesibukan ada pelaporan anggaran 2018 dan rancangan anggaran 2019, ditambah lagi harus ada kajian terkait peristiwa tsunami itu.

Tapi alhamdulillah nya komitmen pimpinan masing masing OPD yang terkait itu termasuk cepet ya, sehingga dokumen itu bisa selesai tepat waktu, itu kendala terkait penyusunan anggaran, beda lagi jika kendala di lapangan, misal Pemerintah Pusat minta 8 hektar dalam satu lokasi untuk huntap, kita menjawab itu tidak mungkin loh, setelah itu kita pecah, setelah dipecah ada kendala lagi, yang ini berisan dengan masyarakat, ada masyarakat yang berangapan, yasudahlah karena untuk kebutuhan orang yang terkena bencana ini, tapi ada juga masyarakat yang mencari keuntungan dengan itu, namanya juga, mumpung ini gitulah, emang perlu komunikasi yang baguslah untuk itu.

Informasi di atas dibenarkan oleh Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan yang telah peneliti wawancara pada 06 September 2021 yang dilaksanakan secara tatap muka di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan. Berikut merupakan kutipan informasi tersebut, yaitu:

Pada saat terjadinya tsunami selat sunda, Pemerintah Daerah bersama dengan Tagana (taruna siaga bencana) yang berjumlah 40 relawan (relawan dari dinas sosial) berangkat menuju Desa Way Muli Timur. Hari pertama sampai dengan satu bulan tugas utama kita adalah mendirikan dapur umum, selain itu OPD lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum bertugas membersihkan infrastruktur jalan agar bisa dilalui, dan tugas khusus untuk OPD lainnya.

Dapur umum yang dibuat bertujuan memastikan logistik untuk para korban tsunami. Selain itu kami ada yang bertugas di dapur umum, namun ada juga yang di Pos Induk 1 yang bertugas membantu administrasi terkait hal tersebut, ada dari kami juga yang bertugas mendata masalah sosial, seperti korban meninggal dan pemberian bantuan sosial. Terkait anggaran dapur umum kita tidak banyak, nominalnya hanya Rp. 50 juta / Tahun. Sedangkan bantuan santunan kematian senilai Rp. 5 juta dan jaminan hidup senilai Rp. 10 ribu / hari selama 90 hari itu kita usulkan melalui anggaran Kementerian Sosial.

Selanjutnya peneliti mencari tahu apakah perbaikan rumah penduduk dan pemulihan penghidupan masyarakat pascabencana yang sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi untuk mendapatkan jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Kabid Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 06 September 2021 yang dilakukan secara tatap muka, berikut kutipan hasil wawancaranya:

Manajemen bencana itu tidak hanya sekedar pascabencana, ada istilahnya prabencana, kami berpendapat bahwa masyarakat tangguh itu adalah yang bukan sekedar mudah pulih setelah bencana, namun juga bisa mengurangi risiko sebelum terjadinya bencana pada waktu kemudian hari. Apabila kita melihat katalog BNPB tentang desa rawan bencana, terdapat 53 ribu desa rawan bencana, yang setiap ancaman bencana, ada katalog bencananya masing-masing, misal katalog gempa bumi, banjir dan lain sebagainya.

Setelah itu kita rekap seluruh desa yang ada di Lampung selatan, misal desa pematang pasir, risiko gempa bumi bagaimana, banjir bagaimana, ada yang punya 2 jenis ancaman dan lebih. Dari 256 desa, ada 152 desa rawan multi bencana, dari itu baru 4 desa tangguh bencana. Setelah itu kita bandingkan lagi, apakah masyarakat tahu bahwa mereka berada di desa rawan bencana, apakah masyarakat tahu jenis ancaman apa yang ada di desanya, apakah masyarakat tahu bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadinya bencana, memang saat ini saya lihat ternyata jauh dari kondisi ideal, bahkan dari 152 itu saja, yang dibina / dibentuk menjadi desa tangguh bencana baru 4, baru 0,2 % dari keseluruhan desa-desa yang terdapat di Lampung Selatan.

Ketika masyarakat itu dibentuk desa tangguh bencana, masyarakat tau apa ancaman di desanya, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi ancaman risiko bencana tersebut, strategi dan rencana apa yang bisa mereka lakukan. Masyarakat bisa menggunakan anggaran desa, misal untuk kegiatan normalisasi sungai, alokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana, dan lain sebagainya. Desa tangguh bencana tahu bagaimana caranya hidup harmoni dengan risiko bencana, cepat pulih ketika terjadi bencana, dan tidak selalu bergantung pada pemerintah. Masyarakat tangguh bencana tahu bagaimana cara membuat rencana kontijensinya, sumberdaya apa yang ada didesa yang dapat digunakan untuk pemulihan pascabencana.

### **4.3 Hasil Pengolahan Data**

Hasil pengolahan data pada penelitian ini dilakukan pada jawaban wawancara mendalam dan kuesioner yang telah diisi oleh subjek penelitian. Pengolahan data tersebut meliputi perhitungan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman dan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018, serta strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah. Hasil pengolahan data pada penelitian ini dimaksudkan agar data yang diperoleh menjadi data yang telah dikategorisasi, disistematiskan, dan dimaknai oleh peneliti, sehingga data yang telah diperoleh layak untuk dianalisis dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.

#### **4.3.1 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018**

Perhitungan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 terdiri atas 2 (dua) sub sektor, yaitu sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan. Perhitungan tersebut menggunakan formula Standarisasi Nilai di setiap indikator =

$\frac{\text{Rata-rata Nilai Indikator} - \text{Nilai Minimum Indikator}}{\text{Nilai Maksimum Indikator} - \text{Nilai Minimum Indikator}} \times 100\%$  dan *Baseline* Nilai

$$\text{Indikator} = \frac{\text{Standarisasi Nilai Tahun Berjalan}}{\text{Standarisasi Nilai Tahun 2017}} \times 100\%$$

#### 4.3.1.1 Sektor Permukiman Sub Sektor Perumahan

Perhitungan pada sub sektor perumahan terdiri atas 9 (sembilan) indikator, yaitu status kepemilikan rumah, luas bangunan rumah, luas lahan, kondisi atap bangunan rumah, kondisi dinding bangunan rumah, kondisi lantai bangunan rumah, keberfungsian rumah, aktivitas dan kondisi sarana MCK, serta tempat pembuangan limbah cair.

##### a. Indikator Status Kepemilikan Rumah

Perhitungan terhadap indikator kepemilikan rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “bagaimana status kepemilikan rumah/tempat tinggal”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab menumpang atau diminta menempati (pemilik bukan orang tua/mertua), bernilai 2 apabila menjawab sewa/kontrak, bernilai 3 apabila menjawab milik orang tua/mertua, bernilai 4 jika menjawab milik sendiri. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator status kepemilikan rumah bisa dibaca dalam Tabel 4.13.

**Tabel 4.13 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Status Kepemilikan Rumah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,74	1,70	1,07	1,24	3,79
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	91,43	23,17	2,22	7,94	93,02
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	25,35	2,43	8,68	101,74

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.13 menegaskan dengan sangat jelas bahwa indikator status kepemilikan rumah dalam sub sektor perumahan

mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *baseline* tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021). Hal ini berarti bahwa masyarakat terdampak bencana telah membangun rumahnya kembali pada pemulihan tahun ketiga (tahun 2021).

b. Indikator Luas Bangunan Rumah

Perhitungan terhadap indikator luas bangunan rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “berapa luas bangunan rumah (dalam m<sup>2</sup>)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab kurang dari 36 m<sup>2</sup>, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 45 m<sup>2</sup>, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 54 m<sup>2</sup>, bernilai 4 jika menjawab lebih dari 54 m<sup>2</sup>.

Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator luas bangunan rumah sub sektor perumahan sektor permukiman bisa dibaca dalam Tabel 4.14 di bawah ini.

**Tabel 4.14 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Luas Bangunan Rumah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,77	1,73	1,16	1,20	2,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	92,38	24,44	5,40	6,67	33,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	26,46	5,84	7,22	36,08

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.14 memberikan pemahaman bahwa indeks pemulihan pada indikator luas rumah yang ada di dalam sub sektor perumahan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan indeks tahun 2017 yang menjadi *baseline* pemulihan. Hal ini berarti

bahwa luas bangunan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk masyarakat terdampak bencana tidak lebih luas dibandingkan luas bangunan rumah yang dimiliki masyarakat sebelum terjadinya bencana tsunami.

c. Indikator Luas Lahan

Perhitungan terhadap indikator luas bangunan rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “berapa luas total lahan rumah dan pekarangan (dalam m<sup>2</sup>)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab kurang dari 36 m<sup>2</sup>, bernilai 2 apabila menjawab kurang dr 45 m<sup>2</sup>, bernilai 3 apabila menjawab kurang dr 54 m<sup>2</sup>, bernilai 4 jika menjawab lebih dr 54 m<sup>2</sup>. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator luas lahan bisa dibaca dalam Tabel 4.15.

**Tabel 4.15 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Luas Lahan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,69	1,50	1,14	1,16	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	89,52	16,51	4,76	5,40	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	18,44	5,32	6,03	111,70

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.15 memberikan makna bahwa indikator luas lahan yang ada di dalam sub sektor perumahan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021). Hal ini memberikan arti bahwa luas lahan relokasi yang diperoleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan, secara keseluruhan lebih luas dibandingkan dengan

luas lahan perumahan yang dimiliki masyarakat sebelum terjadinya bencana.

d. Indikator Kondisi Atap Bangunan Rumah

Perhitungan terhadap indikator kondisi atap bangunan rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana kondisi atap bangunan rumah/tempat tinggal”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab ijuk/rumbiah/tenda, bernilai 2 apabila menjawab asbes/seng, bernilai 3 apabila menjawab genteng, dan bernilai 4 jika menjawab beton. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kondisi atap bangunan rumah bisa dibaca dalam Tabel 4.16.

**Tabel 4.16 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Atap Bangunan Rumah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,79	2,05	2,07	2,11	2,37
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	59,68	34,92	35,56	37,14	45,71
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	58,51	59,57	62,23	76,60

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.16 memberikan makna bahwa indeks pemulihan pada indikator kondisi atap bangunan rumah dalam sub sektor perumahan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan indeks tahun 2017 yang menjadi *baseline* pemulihan. Hal ini berarti bahwa kondisi atap bangunan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk masyarakat terdampak bencana tidak lebih baik dibandingkan kondisi atap bangunan rumah yang dimiliki masyarakat sebelum terjadinya bencana tsunami.

e. Indikator Kondisi Dinding Bangunan Rumah

Perhitungan terhadap indikator kondisi dinding bangunan rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana kondisi dinding bangunan rumah/tempat tinggal”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab bilik/anyaman bamboo/tenda, bernilai 2 apabila menjawab triplek/papan kayu, bernilai 3 apabila menjawab bata merah/batu kapur tanpa aci, dan bernilai 4 jika menjawab tembok. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kondisi dinding bangunan rumah bisa dibaca dalam Tabel 4.17.

**Tabel 4.17 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Dinding Bangunan Rumah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,87	2,32	2,15	2,11	3,86
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	62,22	44,13	38,41	37,14	95,24
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	70,92	61,73	59,69	153,06

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.17 memberikan penjelasan dengan sangat jelas bahwa indikator kondisi dinding bangunan rumah yang ada di dalam sub sektor perumahan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021). Hal ini memberikan arti bahwa dinding bangunan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi dinding bangunan rumah masyarakat sebelum terdampak bencana.

f. Indikator Kondisi Lantai Bangunan Rumah

Perhitungan terhadap indikator kondisi lantai bangunan rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana kondisi lantai bangunan rumah/tempat tinggal”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tanah, bernilai 2 apabila menjawab kayu/semen, bernilai 3 apabila menjawab tegel/keramik, dan bernilai 4 apabila menjawab geranit/marmer. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kondisi lantai bangunan rumah bisa dibaca dalam Tabel 4.18.

**Tabel 4.18 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Lantai Bangunan Rumah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,50	1,96	1,97	1,92	2,22
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	49,84	32,06	32,38	30,79	40,63
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	64,33	64,97	61,78	81,53

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.18, dapat dipahami bahwa indeks pemulihan pada indikator kondisi lantai bangunan rumah dalam sub sektor perumahan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan indeks tahun 2017 yang menjadi *baseline* pemulihan. Hal ini berarti bahwa kondisi lantai bangunan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk masyarakat terdampak bencana tidak lebih baik dibandingkan kondisi lantai bangunan rumah yang dimiliki masyarakat sebelum terjadinya bencana tsunami.

g. Indikator Keberfungsian Rumah

Perhitungan terhadap indikator keberfungsian rumah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana keberfungsian rumah/tempat tinggal”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab rusak, tidak bisa ditinggali, bernilai 2 apabila menjawab sudah banyak yang rusak, tapi masih bisa ditinggali, bernilai 3 apabila menjawab hanya rusak sedikit, sehingga bisa ditinggali, dan bernilai 4 jika menjawab tidak ada yang rusak, berfungsi dengan baik. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator keberfungsian rumah bisa dibaca dalam Tabel 4.19.

**Tabel 4.19 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Keberfungsian Rumah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,91	1,27	1,29	1,75	3,96
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	97,14	8,89	9,52	25,08	98,73
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	9,15	9,80	25,82	101,63

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.19 di atas, dapat dipahami bahwa indikator status kepemilikan rumah dalam sub sektor perumahan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

h. Indikator Aktivitas dan Kondisi Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)

Perhitungan terhadap indikator aktivitas dan sarana MCK didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana

aktivitas dan kondisi sarana MCK anggota keluarga”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab sungai/waduk/ladang/kebun, bernilai 2 apabila menjawab kamar mandi/toilet bersama, bernilai 3 apabila menjawab kamar mandi milik sendiri, bangunan bukan tembok, dan bernilai 4 jika menjawab kamar mandi milik sendiri, bangunan tembok. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator aktivitas dan sarana MCK bisa dibaca dalam Tabel 4.20.

**Tabel 4.20 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Aktivitas dan Kondisi Sarana MCK**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,75	2,05	2,07	2,34	3,80
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	58,41	34,92	35,56	44,76	93,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	59,78	60,87	76,63	159,78

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.20, dapat dipahami bahwa indikator aktivitas dan kondisi sarana MCK dalam sub sektor perumahan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

i. Indikator Indikator Tempat Pembuangan Limbah Cair

Perhitungan terhadap indikator tempat pembuangan limbah cair didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Di mana tempat pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab dibuang langsung ke sungai/selokan/saluran

drainase, bernilai 2 apabila menjawab dibuang ke lahan/lubang terbuka, bernilai 3 apabila menjawab dibuang ke *septic tank* bersama/umum, bangunan permanen dan tertutup, dan bernilai 4 jika menjawab dibuang ke *septic tank* milik sendiri, bangunan permanen dan tertutup. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator tempat pembuangan limbah cair bisa dibaca dalam Tabel 4.21.

**Tabel 4.21 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Tempat Pembuangan Limbah Cair**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,24	2,26	2,27	2,13	2,78
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	41,27	41,90	42,22	37,78	59,37
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	101,54	102,31	91,54	143,85

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.21 memberikan pengertian bahwa indikator tempat pembuangan limbah cair dalam sub sektor perumahan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

#### 4.3.1.2 Sektor Permukiman Sub Sektor Prasarana Lingkungan

Perhitungan pada sub sektor perumahan terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu kondisi drainase/selokan di sekitar rumah, tempat pembuangan sementara (TPS) sampah rumah tangga, kondisi penerangan jalan umum (PJU) di RT setempat.

##### a. Indikator kondisi drainase/selokan

Perhitungan terhadap indikator drainase/selokan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “bagaimana kondisi

drainase/selokan di sekitar rumah”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab ada, bukan tembok, bernilai 3 apabila menjawab ada, tembok dan sebagian besar rusak, dan bernilai 4 jika menjawab ada, tembok dan sebagian besar berfungsi dengan baik. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator drainase/selokan bisa dibaca dalam Tabel 4.22.

**Tabel 4.22 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Drainase/Selokan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,68	1,51	1,64	1,73	3,61
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	55,87	17,14	21,27	24,44	86,98
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	30,68	38,07	43,75	155,68

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.22 memberikan arti bahwa indikator kondisi drainase atau selokan yang ada dalam sub sektor prasarana lingkungan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

b. Indikator Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Perhitungan terhadap indikator tempat pembuangan sementara (TPS) didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “apakah dalam satu RW/dusun/kampung terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) sampah rumah tangga”.

Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab ada, tidak difungsikan, bernilai 3 apabila menjawab ada, difungsikan

tetapi tidak terawat, dan bernilai 4 jika menjawab ada, difungsikan dan terawat.

Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator tempat pembuangan sementara (TPS) dalam sub sektor prasarana lingkungan sektor permukiman pascabencana tsunami bisa dibaca dalam Tabel 4.23.

**Tabel 4.23 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Tempat Pembuangan Sementara (TPS)**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	1,13	1,17	1,28	1,30	1,34
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	4,44	5,71	9,29	10,16	11,43
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	128,57	209,13	228,57	257,14

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.23, dapat dipahami bahwa indikator tempat pembuangan sementara dalam sub sektor prasarana lingkungan tidak terdampak oleh kejadian bencana dan bahkan memperoleh pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan *baseline* tahun 2017.

c. Indikator Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU)

Perhitungan terhadap indikator kondisi penerangan jalan umum (PJU) didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “bagaimana kondisi penerangan jalan umum (PJU) di RT setempat”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab ada, sebagian besar lampu mati/rusak, bernilai 3 apabila menjawab ada, sebagian kecil lampu mati/rusak, dan bernilai 4 jika menjawab ada, hampir/semua lampu menyala. Rata-rata nilai

dan standarisasi skor pada indikator kondisi penerangan jalan umum (PJU) bisa dibaca dalam Tabel 4.24.

**Tabel 4.24 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU)**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,18	1,90	2,02	2,76	3,39
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	39,37	29,84	33,97	58,73	79,68
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	75,81	86,29	149,19	202,42

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Arti dari Tabel 4.24 di atas adalah indikator kondisi penerangan jalan umum yang ada dalam sub sektor prasarana lingkungan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

#### 4.3.2 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018.

Perhitungan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018 terdiri atas 8 (delapan) sub sektor, yaitu sub sektor pertanian, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan dan kelautan, sub sektor perdagangan, sub sektor koperasi dan ukm, sub sektor perindustrian, sub sektor pariwisata, hotel dan restoran, dan sub sektor informal lainnya. . Perhitungan tersebut menggunakan formula Standarisasi Nilai di setiap

indikator =  $\frac{\text{Rata-rata Nilai Indikator} - \text{Nilai Minimum Indikator}}{\text{Nilai Maksimum Indikator} - \text{Nilai Minimum Indikator}} \times 100\%$  dan *Baseline*

Nilai Indikator =  $\frac{\text{Standarisasi Nilai Tahun Berjalan}}{\text{Standarisasi Nilai Tahun 2017}} \times 100\%$ .

#### 4.3.2.1 Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian

Perhitungan pada sub sektor pertanian terdiri atas 7 (tujuh) indikator, yaitu luas lahan pertanian, status kepemilikan lahan, kondisi saluran irigasi, banyak bulan air tersedia untuk pengairan lahan, jenis tanaman/komoditas yang ditanam, frekuensi panen per tahun, nilai pendapatan dari hasil usaha pertanian.

##### a. Indikator Luas Lahan Pertanian

Perhitungan terhadap indikator luas lahan pertanian didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa luas lahan pertanian (dapat berupa sawah/ladang/kebun) yang digarap/dikelolah kepala/anggota keluarga”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 0,5 hektar, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 2 hektar, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 2 hektar. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator luas lahan pertanian bisa dibaca dalam Tabel 4.25.

**Tabel 4.25 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Luas lahan pertanian**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	50,98	50,98	50,98	50,98	50,98
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Pemaknaan Tabel 4.25 di atas menggambarkan bahwa kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Indikator Status Kepemilikan Lahan

Perhitungan terhadap indikator status kepemilikan lahan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana status kepemilikan lahan pertanian yang digarap”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab petani penggarap (bagi hasil), bernilai 2 apabila menjawab sewa/kontrak, bernilai 3 apabila menjawab milik orang tua/mertua, dan bernilai 4 jika menjawab milik sendiri. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator status kepemilikan lahan bisa dibaca dalam Tabel 4.26.

**Tabel 4.26 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Status Kepemilikan Lahan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Pemaknaan Tabel 4.26 adalah kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada status kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

c. Indikator Kondisi Saluran Irigasi

Perhitungan terhadap indikator kondisi saluran irigasi didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana kondisi saluran irigasi lahan pertanian”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada/rusak, bernilai 2 apabila menjawab berupa galian

tanah/parit, bernilai 3 apabila menjawab sebagian kecil ditembok, dan bernilai 4 jika menjawab sebagian besar ditembok. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kondisi saluran irigasi bisa dibaca dalam Tabel 4.27.

**Tabel 4.27 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Saluran Irigasi**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Arti dari Tabel 4.27 di atas adalah kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada kondisi saluran irigasi pertanian yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

- d. Indikator Banyak Bulan Air Tersedia Untuk Pengairan Lahan  
Perhitungan terhadap indikator banyak bulan air tersedia untuk pengairan lahan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “selama berapa bulan air tersedia untuk pengairan lahan pertanian dalam waktu 1 tahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab kurang dari 3 bulan, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 6 bulan, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 9 bulan, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 9. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator banyak bulan air tersedia untuk pengairan lahan bisa dibaca dalam Tabel 4.28.

**Tabel 4.28 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Banyak Bulan Air Tersedia Untuk Pengairan Lahan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	86,27	86,27	86,27	86,27	86,27
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.28 dapat dimengerti jika kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada indikator banyak bulan air yang tersedia untuk pertanian yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

e. Indikator Jenis Tanaman/Komoditas Yang Ditanam

Perhitungan terhadap indikator jenis tanaman/komoditas yang ditanam didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa jenis tanaman/komoditas yang biasanya ditanam dalam setahun (khusus lahan garapan yang dihandalkan keluarga)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak menanam, bernilai 2 apabila menjawab 1 jenis, bernilai 3 apabila menjawab 2-3 jenis, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 3 jenis. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jenis tanaman/komoditas yang ditanam bisa dibaca dalam Tabel 4.29.

**Tabel 4.29 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jenis Tanaman/Komoditas Yang Ditanam**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,24	1,35	1,76	2,29	2,35
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	41,18	11,76	25,49	43,14	45,10
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	28,57	61,90	104,76	109,52

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.29 di atas, dapat diartikan bahwa indikator banyak jenis komoditas yang ditanam dalam sub sektor pertanian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

f. Indikator Frekuensi Panen Per Tahun

Perhitungan terhadap indikator frekuensi panen per tahun didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa kali panen dalam setahun untuk total lahan garapan, (jika lebih dari 1 jenis lahan garapan, maka jumlahkan frekuensi panen dalam satu tahun)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak panen, bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 apabila menjawab relatif tetap/sama, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator frekuensi panen per tahun bisa dibaca dalam Tabel 4.30.

**Tabel 4.30 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Frekuensi Panen Per Tahun**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,82	1,41	1,82	2,88	3,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	60,78	13,73	27,45	62,75	66,67
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	22,58	45,16	103,23	109,68

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi atas Tabel 4.30 memberikan penjelasan bahwa indikator frekuensi panen pertahun dalam sub sektor pertanian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

- g. Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Pertanian  
Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan dari hasil usaha pertanian didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa pendapatan dari hasil usaha pertanian dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan dari hasil usaha pertanian bisa dibaca dalam Tabel 4.31.

**Tabel 4.31 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Pertanian**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,00	1,41	1,47	2,00	2,29
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	33,33	13,73	15,69	33,33	43,14
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	41,18	47,06	100,00	129,41

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambaran Tabel 4.31 memberikan penjelasan bahwa indikator nilai pendapatan dari hasil usaha pertanian dalam sub sektor pertanian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

#### 4.3.2.2 Sektor Ekonomi Sub Sektor Peternakan

Perhitungan pada sub sektor peternakan terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu kepemilikan usaha ternak, perkembangan jumlah/populasi

hewan ternak, perkembangan luas kandang, perkembangan penjualan hewan ternak, dan nilai pendapatan dari hasil usaha peternakan.

a. Indikator Kepemilikan Usaha Ternak

Perhitungan terhadap indikator kepemilikan usaha ternak didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “apakah kepala atau anggota keluarga mengelola usaha ternak”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 apabila menjawab *reptile*/serangga/unggas (ayam, bebek, burung), bernilai 3 apabila menjawab kambing/domba, dan bernilai 4 jika menjawab sapi/kerbau/kuda. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kepemilikan usaha ternak bisa dibaca dalam Tabel 4.32.

**Tabel 4.32 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kepemilikan Usaha Ternak**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.32 memberikan estimasi jika kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada indikator status kepemilikan usaha ternak yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Indikator Perkembangan Jumlah/Populasi Hewan Ternak

Perhitungan terhadap indikator perkembangan jumlah/populasi hewan ternak didasarkan pada jawaban atas pertanyaan

“Bagaimana perkembangan jumlah/populasi hewan ternak yang dimiliki keluarga dibandingkan sebelum bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 jika menjawab berkurang, bernilai 3 apabila menjawab sama (sebagai titik awal kepemilikan), dan bernilai 4 jika menjawab bertambah. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan jumlah/populasi hewan ternak bisa dibaca dalam Tabel 4.33.

**Tabel 4.33 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Jumlah/Populasi Hewan Ternak**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	2,00	2,00	3,60	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	33,33	33,33	86,67	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	50,00	50,00	130,00	150,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi atas Tabel 4.33 dapat dimengerti bahwa indikator perkembangan jumlah hewan ternak dalam sub sektor peternakan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

c. Indikator Perkembangan Luas Kandang

Perhitungan terhadap indikator perkembangan luas kandang didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana perkembangan luas kandang hewan ternak”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 apabila menjawab berkurang, bernilai 3 apabila menjawab sama, dan bernilai 4 jika menjawab lebih

luas/bertambah. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan luas kandang bisa dibaca dalam Tabel 4.34.

**Tabel 4.34 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Luas Kandang**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	2,00	2,00	2,40	2,80
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	33,33	33,33	46,67	60,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	50,00	50,00	70,00	90,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi atas Tabel 4.34 berarti bahwa indikator luas kandang hewan ternak yang ada di dalam sub sektor peternakan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

d. Indikator Perkembangan Penjualan Hewan Ternak

Perhitungan terhadap indikator perkembangan penjualan hewan ternak didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana perkembangan penjualan hewan ternak dibanding sebelum bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak menjual, bernilai 2 apabila menjawab berkurang, bernilai 3 apabila menjawab sama, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan penjualan hewan ternak bisa dibaca dalam Tabel 4.35.

**Tabel 4.35 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Penjualan Hewan Ternak**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	2,00	2,00	2,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	33,33	33,33	33,33	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	50,00	50,00	50,00	150,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Pemaknaan Tabel 4.35 mengindikasikan bahwa indikator perkembangan penjualan hewan ternak dalam sub sektor peternakan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedtiga (2021).

- e. Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Peternakan
- Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan dari hasil usaha peternakan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan keluarga dari hasil usaha peternakan dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 apabila menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan dari hasil usaha peternakan bisa dibaca dalam Tabel 4.36.

**Tabel 4.36 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Peternakan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	1,40	2,20	2,80	2,60
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	13,33	40,00	60,00	53,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	20,00	60,00	90,00	80,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut informasi Tabel 4.36, dapat dipahami bahwa indikator nilai pendapatan usaha peternakan dalam sub sektor peternakan memiliki indeks atau mencapai indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017. Hal ini berarti bahwa pada tahun seteleha terjadinya bencana, masyarakat yang bekerja pada sub sektor peternakan mendapatkan penghasilan yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelum terjadinya bencana.

#### **4.3.2.3 Sektor Ekonomi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan**

Secara umum perhitungan pada sub sektor perikanan dan kelautan terdiri atas 2 (dua) jenis usaha, yaitu usaha budidaya perikanan dan usaha perikanan tangkap (nelayan). Jenis usaha budidaya perikanan terdiri atas 4 (empat) indikator, yaitu luas lahan budidaya, status kepemilikan lahan frekuensi panen per tahun, dan nilai pendapatan dari hasil usaha perikanan. Sedangkan pada jenis usaha perikanan tangkap terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu status kepemilikan perahu/kapal, jarak terjauh menangkap ikan, nilai pendapatan dari hasil perikanan tangkap per tahun, nilai pendapatan budidaya laut di luar usaha perikanan tangkap, dan perkembangan hasil usaha perikanan tangkap maupun budidaya laut.

a. Indikator Luas Lahan Budidaya

Perhitungan terhadap indikator luas lahan budidaya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “berapa luas lahan/area atau tempat yang dikelola untuk usaha perikanan”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 0,5 hektar, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 2 hektar, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 2 hektar. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator luas lahan budidaya bisa dibaca dalam Tabel 4.37.

**Tabel 4.37 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Luas Lahan Budidaya**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.37 di atas, kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada indikator luas lahan budidaya perikanan yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Indikator Status Kepemilikan Lahan

Perhitungan terhadap indikator status kepemilikan lahan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “bagaimana status kepemilikan lahan/area/tempat untuk usaha perikanan”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 apabila menjawab

sewa/kontrak/bagi hasil, bernilai 3 apabila menjawab milik orang tua/keluarga, dan bernilai 4 jika menjawab milik sendiri. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator status kepemilikan lahan bisa dibaca dalam Tabel 4.38.

**Tabel 4.38 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Status Kepemilikan Lahan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	4,00	3,67	3,67	3,67	3,67
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	100	88,89	88,89	88,89	88,89
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	89	89	89	89

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.38 di atas, dapat diketahui bahwa indikator luas kepemilikan lahan usaha perikanan dan kelautan memiliki indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017.

c. Indikator Frekuensi Panen Per Tahun

Perhitungan terhadap indikator frekuensi panen per tahun didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “biasanya berapa kali panen dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tidak panen, bernilai 2 apabila menjawab panen lebih dari setahun, bernilai 3 apabila menjawab 1-3 kali, dan bernilai 4 apabila menjawab lebih dari 3 kali. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator frekuensi panen per tahun bisa dibaca dalam Tabel 4.39.

**Tabel 4.39 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Frekuensi Panen Per Tahun**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.39 di atas, kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada indikator frekuensi panen pertahun pada sektor perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

d. Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Perikanan

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan dari hasil usaha perikanan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan keluarga dari hasil usaha perikanan dalam setahun”.

Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 apabila menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan dari hasil usaha perikanan bisa dibaca dalam Tabel 4.40.

**Tabel 4.40 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Perikanan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,21	1,29	2,00	2,21	2,29
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	40,48	9,52	33,33	40,48	42,86
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	23,53	82,35	100,00	105,88

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi Tabel 4.40 memberikan makna bahwa indikator nilai pendapatan dari usaha perikanan dan kelautan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

e. Indikator Status Kepemilikan Perahu/Kapal

Perhitungan terhadap indikator status kepemilikan perahu/kapal didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana status kepemilikan perahu/kapal”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah mendapatkan nilai atau skor 1 apabila menjawab tidak punya, mendapatkan nilai atau skor 2 apabila menjawab sewa/kontrak/bagi hasil, mendapatkan nilai atau skor 3 apabila menjawab milik orang tua/keluarga, dan mendapatkan nilai atau skor 4 apabila menjawab milik sendiri. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator status kepemilikan perahu/kapal bisa dibaca dalam Tabel 4.41.

**Tabel 4.41 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Status Kepemilikan Perahu/Kapal**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,73	3,18	3,32	3,73	3,73
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	90,91	72,73	77,27	90,91	90,91
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	80,00	85,00	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.41 di atas, peneliti memberikan bahwa indikator status kepemilikan perahun pada sub sektor perikanan dan kelautan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

f. Indikator Jarak Terjauh Menangkap Ikan

Perhitungan terhadap indikator jarak terjauh menangkap ikan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa jarak terjauh menangkap ikan? 1), 2), 3), 4)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak menangkap ikan, bernilai 2 apabila menjawab lebih dari 10km, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 10km, dan bernilai 4 jika menjawab kurang dari 5km. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jarak terjauh menangkap ikan bisa dibaca dalam Tabel 4.42.

**Tabel 4.42 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jarak Terjauh Menangkap Ikan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,59	1,27	2,27	2,59	2,59
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	53,03	9,09	42,42	53,03	53,03
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	17,14	80,00	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.42 di atas, peneliti mengartikan bahwa indikator jarak terjangkau menangkap ikan dalam sub sektor perikanan dan kelautan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

g. Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Perikanan Tangkap Per Tahun

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan dari hasil perikanan tangkap per tahun didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “berapa rata-rata pendapatan keluarga sebagai nelayan/usaha perikanan tangkap dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan dari hasil perikanan tangkap per tahun bisa dibaca dalam Tabel 4.43.

**Tabel 4.43 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Perikanan Tangkap Per Tahun**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,00	1,23	1,73	2,00	2,05
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	33,33	7,58	24,24	33,33	34,85
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	22,73	72,73	100	104,55

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berasakan Tabel 4.43 di atas, dapat diartikan bahwa indikator pendapatan dari hasil perikanan tangkap dalam sub sektor perikanan dan kelautan mencapai indeks pemulihan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

h. Indikator Nilai Pendapatan Budidaya Laut Di Luar Usaha Perikanan Tangkap Per Tahun

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan budidaya laut di luar usaha perikanan tangkap per tahun didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “berapa rata-rata pendapatan dari sektor budidaya laut di luar usaha perikanan tangkap (misalnya usaha tambak garam, rumput laut, pengolahan ikan, dll.)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 jika menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan budidaya laut di luar usaha perikanan tangkap per tahun bisa dibaca dalam Tabel 4.44.

**Tabel 4.44 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Budidaya Laut Di Luar Usaha Perikanan Tangkap Per Tahun**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	1,17	1,00	1,17	1,17	1,17
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	5,56	-	5,56	5,56	5,56
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	-	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Mengikuti Tabel 4.44, peneliti memberikan pemahaman bahwa indikator pendapatan dari hasil budidaya laut dalam sub sektor perikanan dan kelautan mencapai indeks pemulihan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun pertama (2019).

i. Indikator Perkembangan Hasil Usaha Perikanan Tangkap Maupun Budidaya Laut

Perhitungan terhadap indikator perkembangan hasil usaha perikanan tangkap maupun budidaya laut didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “bagaimana perkembangan hasil usaha perikanan tangkap maupun usaha budidaya laut dibandingkan sebelum terjadi bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak menangkap ikan, bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 apabila menjawab sama saja, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan hasil usaha perikanan tangkap maupun budidaya laut bisa dibaca dalam Tabel 4.45.

**Tabel 4.45 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Hasil Usaha Perikanan Tangkap Maupun Budidaya Laut**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,54	1,62	2,00	2,92	3,23
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	51,28	20,51	33,33	64,10	74,36
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	40,00	65,00	125,00	145,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut analisis Tabel 4.45, dapat diartikan bahwa indikator perkembangan hasil usaha perikanan tangkap dalam sub sektor perikanan dan kelautan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

#### 4.3.2.4 Sektor Ekonomi Sub Sektor Perdagangan

Perhitungan pada sub sektor perdagangan terdiri atas 7 (tujuh) indikator, yaitu kemudahan mendapatkan bahan pokok, harga bahan pokok, jam operasional usaha, jumlah hari operasional dalam seminggu, perkembangan jenis barang dagangan, persoalan kelangkaan barang, dan pendapatan usaha perdagangan.

##### a. Indikator Kemudahan Mendapatkan Bahan Pokok

Perhitungan terhadap indikator kemudahan mendapatkan bahan pokok didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana mendapatkan bahan kebutuhan pokok (beras) dibanding sebelum bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab lebih jauh/sulit, bernilai 3 apabila menjawab relatif sama, dan bernilai 4 jika menjawab lebih mudah/dekat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kemudahan mendapatkan bahan pokok bisa dibaca dalam Tabel 4.46.

**Tabel 4.46 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kemudahan Mendapatkan Bahan Pokok**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,77	2,23	2,38	2,46	3,92
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	92,31	41,03	46,15	48,72	97,44
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	44,44	50,00	52,78	105,56

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.46 di atas, dapat dipahami bahwa indikator kemudahan mendapatkan bahan pokok dalam sub sektor perdagangan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

b. Indikator Harga Bahan Pokok

Perhitungan terhadap indikator harga bahan pokok didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana harga bahan kebutuhan pokok (berupa beras) dibanding sebelum bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab jauh lebih mahal, bernilai 2 apabila menjawab lebih mahal, bernilai 3 apabila menjawab relatif sama, dan bernilai 4 jika menjawab lebih murah. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator harga bahan pokok bisa dibaca dalam Tabel 4.47.

**Tabel 4.47 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Harga Bahan Pokok**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,92	2,85	2,77	2,85	2,85
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	64,10	61,54	58,97	61,54	61,54
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	96,00	92,00	96,00	96,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Analisis Tabel 4.47 di atas, dapat diartikan bahwa indikator harga bahan pokok dalam sub sektor perdagangan memiliki indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017. Hal ini berarti bahwa harga bahan pokok pada tahun sebelum terjadinya bencana lebih murah dibandingkan dengan setelah terjadinya bencana.

c. Indikator Jam Operasional Usaha

Perhitungan terhadap indikator jam operasional usaha didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana jam operasional atau buka toko/kios”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum buka/tutup, bernilai 2 apabila menjawab pagi sampai siang hari, bernilai 3 apabila menjawab pagi sampai sore hari/malam sampai pagi hari, dan bernilai 4 jika menjawab pagi sampai malam hari, atau malam sampai pagi menjelang siang hari. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jam operasional usaha bisa dibaca dalam Tabel 4.48.

**Tabel 4.48 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jam Operasional Usaha**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,31	1,23	1,62	2,00	2,77
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	43,59	7,69	20,51	33,33	58,97
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	17,65	47,06	76,47	135,29

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Hasil atas Tabel 4.48 memberikan arti jika indikator jam operasional usaha yang ada dalam sub sektor perdagangan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

d. Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu

Perhitungan terhadap indikator jumlah hari operasional dalam seminggu didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa hari tempat usaha buka dalam seminggu”. Penentuan skor

terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum buka/tutup, bernilai 2 apabila menjawab 1-3 hari, bernilai 3 apabila menjawab 4-6 hari, dan bernilai 4 jika menjawab 7 hari. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator indikator jumlah hari operasional dalam seminggu bisa dibaca dalam Tabel 4.49.

**Tabel 4.49 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,85	1,15	1,69	2,08	3,85
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	94,87	5,13	23,08	35,90	94,87
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	5,41	24,32	37,84	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Hasil informasi Tabel 4.49 mengartikan bahwa indikator jumlah hari operasional usaha dalam sub sektor perdagangan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

e. Indikator Perkembangan Jenis Barang Dagangan

Perhitungan terhadap indikator perkembangan jenis barang dagangan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana perkembangan jenis barang yang diperdagangkan setelah bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tidak berdagang, bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 apabila menjawab sama, dan bernilai 4 apabila menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator

perkembangan jenis barang dagangan bisa dibaca dalam Tabel 4.50.

**Tabel 4.50 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Jenis Barang Dagangan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,92	1,38	1,92	2,15	3,15
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	64,10	12,82	30,77	38,46	71,79
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	20,00	48,00	60,00	112,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berasaskan Tabel 4.50 di atas, peneliti memahami bahwa indikator perkembangan jenis barang dagangan dalam sub sektor perdagangan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

f. Indikator Persoalan Kelangkaan Barang

Perhitungan terhadap indikator persoalan kelangkaan barang didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Apakah pernah mengalami kelangkaan memperoleh barang dagangan”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tidak berdagang, bernilai 2 apabila menjawab banyak jenis barang langka, bernilai 3 apabila menjawab barang tertentu langka, dan bernilai 4 apabila menjawab tidak pernah. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator persoalan kelangkaan barang bisa dibaca dalam Tabel 4.51.

**Tabel 4.51 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Persoalan Kelangkaan Barang**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,69	1,62	1,85	2,31	3,38
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	89,74	20,51	28,21	43,59	79,49
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	22,86	31,43	48,57	88,57

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Menurut Tabel 4.51 di atas, dapat dimaknai bahwa masyarakat mengalami kelangkaan barang pada saat setelah terjadinya bencana dibandingkan kondisi sebelum terjadinya bencana.

g. Indikator Pendapatan Usaha Perdagangan

Perhitungan terhadap indikator pendapatan usaha perdagangan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan dari usaha perdagangan dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 25 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 50 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 50 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator pendapatan usaha perdagangan bisa dibaca dalam Tabel 4.52.

**Tabel 4.52 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Pendapatan Usaha Perdagangan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,15	1,23	1,38	1,77	2,15
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	38,46	7,69	12,82	25,64	38,46
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	20,00	33,33	66,67	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi Tabel 4.52 memberikan pemaknaan bahwa indikator nilai pendapatan usaha perdagangan dalam sub sektor perdagangan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

#### 4.3.2.5 Sektor Ekonomi Sub Sektor Koperasi dan UKM

Perhitungan pada sub sektor koperasi dan UKM terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu jam operasional usaha, jumlah hari operasional dalam seminggu, jumlah karyawan, perkembangan jenis barang dagangan, kepemilikan mesin produksi, dan pendapatan usaha.

##### a. Indikator Jam Operasional Usaha

Perhitungan terhadap indikator jam operasional usaha didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa jam operasional usaha dalam 1 hari”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum buka/tutup, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 4 jam, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 7 jam, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 7 jam. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jam operasional usaha bisa dibaca dalam Tabel 4.53.

**Tabel 4.53 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jam Operasional Usaha**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,50	2,50	3,50	3,50	3,50
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	83,33	50,00	83,33	83,33	83,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	60,00	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Angka dalam Tabel 4.53 memberikan pemaknaan bahwa indikator jam operasional usaha dalam sub sektor koperasi dan UKM mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun pertama (2019).

b. Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu

Perhitungan terhadap indikator jumlah hari operasional dalam seminggu didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa hari beroperasi/buka dalam seminggu”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum buka/tutup, bernilai 2 apabila menjawab 1-3 hari, bernilai 3 apabila menjawab 4-6 hari, dan bernilai 4 jika menjawab 7 hari. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jumlah hari operasional dalam seminggu bisa dibaca dalam Tabel 4.54.

**Tabel 4.54 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,50	2,50	3,50	3,50	3,50
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	83,33	50,00	83,33	83,33	83,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	60,00	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Indeks dalam Tabel 4.54 memberikan arti bahwa indikator jumlah hari operasional mingguan dalam sub sektor koperasi dan UKM mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun pertama (2019).

c. Indikator Jumlah Karyawan

Perhitungan terhadap indikator jumlah karyawan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa jumlah karyawan”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 5 org, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 10 org, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 10 org. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jumlah karyawan bisa dibaca dalam Tabel 4.55.

**Tabel 4.55 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Karyawan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

*Baseline* nilai indikator Tabel 4.55 di atas berarti bahwa indikator jumlah karyawan dalam sub sektor koperasi dan UKM tidak terdampak akibat kejadian bencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan.

d. indikator perkembangan jenis barang dagangan

Perhitungan terhadap indikator perkembangan jenis barang dagangan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana perkembangan jenis barang yang dikelola/diproduksi setelah bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak berdagang/berproduksi, bernilai 2 apabila menjawab menurun,

bernilai 3 apabila menjawab sama, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan jenis barang dagangan bisa dibaca dalam Tabel 4.56.

**Tabel 4.56 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Jenis Barang Dagangan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	2,00	2,50	2,50	3,50
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	33,33	50,00	50,00	83,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	50,00	75,00	75,00	125,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Indeks Tabel 4.56 mengartikan bahwa indikator jenis barang dagangan yang ada dalam sub sektor koperasi dan UKM mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

e. Indikator Kepemilikan Mesin Produksi

Perhitungan terhadap indikator kepemilikan mesin produksi didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana status mesin produksi utama yang digunakan”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak punya, bernilai 2 apabila meminjam/bagian dari kerjasama, bernilai 3 apabila menjawab bantuan/sumbangan, dan bernilai 4 jika menjawab milik sendiri. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kepemilikan mesin produksi bisa dibaca dalam Tabel 4.57.

**Tabel 4.57 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kepemilikan Mesin Produksi**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	2,20	2,60	3,00	3,20
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	40,00	53,33	66,67	73,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	60,00	80,00	100,00	110,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

*Baseline* nilai dan indeks dalam Tabel 4.57 di atas memberikan pemaknaan bahwa indikator kepemilikan mesin produksi dalam sub sektor koperasi dan UKM mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

f. Indikator Nilai Pendapatan Usaha

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan usaha didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan dari usaha koperasi/UKM dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 50 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 100 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 100 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan usaha bisa dibaca dalam Tabel 4.58.

**Tabel 4.58 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Usaha**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,50	1,50	2,00	2,00	2,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	50,00	16,67	33,33	33,33	33,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	33,33	66,67	66,67	66,67

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.58 peneliti memberikan makna bahwa indikator pendapatan usaha dalam sub sektor koperasi dan UKM memiliki indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017.

#### 4.3.2.6 Sektor Ekonomi Sub Sektor Perindustrian

Perhitungan pada sub sektor perindustrian terdiri atas 8 (delapan) indikator, yaitu jam operasional usaha, jumlah hari operasional dalam seminggu, kondisi peralatan/mesin produksi, perkembangan kapasitas produksi, perkembangan pendapatan usaha, jumlah hari bekerja buruh pabrik dalam seminggu, jarak rumah ke tempat kerja, nilai pendapatan buruh pabrik dalam setahun.

##### a. Indikator Jam Operasional Usaha

Perhitungan terhadap indikator jam operasional usaha didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “berapa jam operasional usaha dalam sehari”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum buka/tutup, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 4 jam, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 7 jam, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 7 jam. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jam operasional usaha bisa dibaca dalam Tabel 4.59.

**Tabel 4.59 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jam Operasional Usaha**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	100	-	33,33	100,00	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	-	33,33	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.59 memberikan pemaknaan terkait indikator jam operasional usaha yang ada dalam sub sektor perindustrian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

b. Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu

Perhitungan terhadap indikator jumlah hari operasional dalam seminggu didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa hari usaha beroperasi dalam seminggu”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum buka/tutup, bernilai 2 apabila menjawab 1-3 hari, bernilai 3 apabila menjawab 4-6 hari, dan bernilai 4 jika menjawab 7 hari. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jumlah hari operasional dalam seminggu bisa dibaca dalam Tabel 4.60.

**Tabel 4.60 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	100	-	33,33	100,00	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	-	33,33	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi Tabel 4.60 terkait indikator jumlah hari operasional usaha yang ada dalam sub sektor perindustrian mencapai baseline nilai indikator atau indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

c. Indikator Kondisi Peralatan/Mesin Produksi

Perhitungan terhadap indikator kondisi peralatan/mesin produksi didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana kondisi peralatan/mesin produksi sebelum terjadi bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab belum/tidak perproduksi, bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 apabila menjawab relatif sama, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator kondisi peralatan/mesin produksi bisa dibaca dalam Tabel 4.61.

**Tabel 4.61 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Kondisi Peralatan/Mesin Produksi**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.61 di atas memberikan makna terkait indikator kondisi peralatan dan mesin produksi dalam sub sektor perindustrian bahwa indikator tersebut tidak terdampak kejadian bencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan.

d. Indikator Perkembangan Kapasitas Produksi

Perhitungan terhadap indikator perkembangan kapasitas produksi didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana perkembangan kapasitas produksi sebelum terjadi bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab belum/tidak perproduksi,

bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 jika menjawab relatif sama, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan kapasitas produksi bisa dibaca dalam Tabel 4.62.

**Tabel 4.62 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Kapasitas Produksi**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	1,00	4,00	4,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	-	100,00	100,00	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	-	150	150,00	150,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.62 di atas, peneliti memberikan analisis bahwa indikator kapasitas produksi dalam sub sektor perindustrian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun pertama (2019).

e. Indikator Perkembangan Pendapatan Usaha

Perhitungan terhadap indikator perkembangan pendapatan usaha didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Secara umum bagaimana perkembangan pendapatan usaha sebelum terjadi bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 apabila menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 apabila menjawab relative sama, dan bernilai 4 apabila menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan pendapatan usaha bisa dibaca dalam Tabel 4.63.

**Tabel 4.63 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Pendapatan Usaha**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	1,00	4,00	4,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	-	100,00	100,00	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	-	150,00	150,00	150,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Tabel 4.63 dapat dimaknai bahwa indikator perkembangan pendapatan usaha dalam sub sektor perindustrian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 (tahun sebelum terjadinya bencana) pada saat pemulihan tahun pertama (2019).

- f. Indikator Jumlah Hari Bekerja Buruh Pabrik Dalam Seminggu
- Perhitungan terhadap indikator jumlah hari bekerja buruh pabrik dalam seminggu didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa hari kerja per minggu sebagai buruh pabrik”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum bekerja, bernilai 2 apabila menjawab 1-3 hari, bernilai 3 apabila menjawab 4-6 hari, dan bernilai 4 jika menjawab 7 hari. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jumlah hari bekerja buruh pabrik dalam seminggu bisa dibaca dalam Tabel 4.64.

**Tabel 4.64 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Hari Bekerja Buruh Pabrik dalam Seminggu**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	-	66,67	66,67	66,67
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	-	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.64 di atas, dapat dimaknai bahwa indikator jumlah hari bekerja buruh dalam sub sektor perindustrian mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun pertama (2019).

g. Indikator Jarak Rumah Ke Tempat Kerja

Perhitungan terhadap indikator jarak rumah ke tempat kerja didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana jarak dari rumah ke tempat kerja (kantor/pabrik) setelah terjadinya bencana”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum bekerja kembali, bernilai 2 apabila menjawab lebih jauh, bernilai 3 apabila menjawab relative sama, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dekat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jarak rumah ke tempat kerja bisa dibaca dalam Tabel 4.65.

**Tabel 4.65 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jarak Rumah ke Tempat Kerja**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berasaskan Tabel 4.65, jarak rumah masyarakat yang bekerja pada sub sektor perindustrian tidak bertambah maupun berkurang (cenderung konstan) walaupun adanya kejadian bencana.

- h. Indikator Nilai Pendapatan Buruh Pabrik dalam Setahun
- Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan buruh pabrik dalam setahun didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan sebagai pekerja/buruh pabrik dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan buruh pabrik dalam setahun bisa dibaca dalam Tabel 4.66.

**Tabel 4.66 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator** nilai pendapatan buruh pabrik dalam setahun

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	100	150,00	150,00	150,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Informasi atas Tabel 4.66 bermakna nilai pendapatan buruh pabrik setahun dalam sub sektor perindustrian lebih tinggi setelah terjadinya bencana dibandingkan nilai pendapatan buruh pabrik dalam setahun sebelum terjadinya bencana.

#### **4.3.2.7 Sektor Ekonomi Sub Sektor Pariwisata, Hotel dan Restoran**

Perhitungan pada sub sektor pariwisata, hotel dan restoran terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu jumlah hari operasional dalam seminggu, perkembangan usaha, dan nilai pendapatan dari hasil usaha pariwisata.

a. Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu

Perhitungan terhadap indikator jumlah hari operasional dalam seminggu didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa hari kerja per minggu”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak/belum bekerja, bernilai 2 apabila menjawab 1-3 hari, bernilai 3 apabila menjawab 4-6 hari, dan bernilai 4 jika menjawab 7 hari. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator jumlah hari operasional dalam seminggu bisa dibaca dalam Tabel 4.67.

**Tabel 4.67 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Hari Operasional Dalam Seminggu**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,33	1,17	2,50	3,00	3,50
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	77,78	5,56	50,00	66,67	83,33
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	7,14	64,29	85,71	107,14

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Beralaskan Tabel 4.67 di atas, bisa dipahami bahwa indikator jumlah hari operasional usaha dalam sub sektor pariwisata, hotel dan restoran mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

b. Indikator Perkembangan Usaha

Perhitungan terhadap indikator perkembangan usaha didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Bagaimana perkembangan usaha (pendapatan usaha) dibanding sebelum terjadi bencana?”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada/belum buka usaha, bernilai 2 apabila menjawab menurun, bernilai 3 apabila

menjawab relatif sama, dan bernilai 4 jika menjawab meningkat. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator perkembangan usaha bisa dibaca dalam Tabel 4.68.

**Tabel 4.68 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Perkembangan Usaha**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	1,17	2,33	2,33	3,17
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	5,56	44,44	44,44	72,22
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	8,33	66,67	66,67	108,33

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Berasaskan Tabel 4.68 di atas, bisa diartikan bahwa indikator perkembangan usaha dalam sub sektor pariwisata, hotel dan restoran mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

c. Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Pariwisata

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan dari hasil usaha pariwisata didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan sebagai pekerja di sektor pariwisata,/hotel/restoran dalam setahun”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan dari hasil usaha pariwisata bisa dibaca dalam Tabel 4.69.

**Tabel 4.69 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Dari Hasil Usaha Pariwisata**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,00	1,33	2,50	2,83	3,33
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	66,67	11,11	50,00	61,11	77,78
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	16,67	75,00	91,67	116,67

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Beralaskan Tabel 4.69 bisa dipahami bahwa indikator nilai pendapatan usaha pariwisata dalam sub sektor pariwisata, hotel dan restoran mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

#### **4.3.2.8 Sektor Ekonomi Sub Sektor Informal Lainnya**

Perhitungan pada sub sektor informal lainnya terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu jumlah hari bekerja sektor informal dalam sebulan, nilai pendapatan sektor informal, dan nilai pendapatan dari dana program bantuan pemerintah dan pemerintah daerah.

- a. Indikator Jumlah Hari Bekerja Sektor Informal Dalam Sebulan  
Perhitungan terhadap indikator jumlah hari bekerja sektor informal dalam sebulan didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa hari kepala keluarga/anggota keluarga bekerja di sektor informal dalam sebulan (misalnya buruh bangunan, pedagang kaki lima, atau buruh harian lainnya)”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak bekerja, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 hari, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 20 hari, dan bernilai 4 jika menjawab lebih dari 20 hari. Rata-rata

nilai dan standarisasi skor pada indikator jumlah hari bekerja sektor informal dalam sebulan bisa dibaca dalam Tabel 4.70.

**Tabel 4.70 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Jumlah Hari Bekerja Sektor Informal Dalam Sebulan**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	3,62	1,19	3,05	3,19	3,62
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	87,30	6,35	68,25	73,02	87,30
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	7,27	78,18	83,64	100,00

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.70 di atas, bisa dimaknai bahwa indikator jumlah hari bekerja dalam sub sektor informal lainnya mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

b. Indikator Nilai Pendapatan Sektor Informal

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan sektor informal didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa rata-rata pendapatan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya dari sektor informal dalam setahun.” Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan sektor informal bisa dibaca dalam Tabel 4.71.

**Tabel 4.71 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Nilai Pendapatan Sektor Informal**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	2,50	1,33	2,42	2,63	2,67
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	50,00	11,11	47,22	54,17	55,56
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	22,22	94,44	108,33	111,11

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Tabel 4.71 di atas, bisa dimaknai bahwa indikator nilai pendapatan sektor informal dalam sub sektor informal lainnya mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020).

c. Indikator Nilai Pendapatan Dari Dana Program Bantuan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Perhitungan terhadap indikator nilai pendapatan dari dana program bantuan pemerintah dan pemerintah daerah didasarkan pada jawaban atas pertanyaan “Berapa pendapatan yang diperoleh anggota rumah tangga dari dana program bantuan pemerintah”. Penentuan skor terhadap pertanyaan tersebut adalah bernilai 1 jika menjawab tidak ada, bernilai 2 apabila menjawab kurang dari 10 juta, bernilai 3 apabila menjawab kurang dari 25 juta, dan bernilai 4 jika menjawab di atas 25 juta. Rata-rata nilai dan standarisasi skor pada indikator nilai pendapatan dari dana program bantuan pemerintah dan pemerintah daerah bisa dibaca dalam Tabel 4.72.

**Tabel 4.72 Rata-rata Nilai dan Standarisasi Skor Pada Indikator Pendapatan Dari Dana Program Bantuan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah**

No	Hasil Pengolahan Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Nilai Indikator	1,57	2,00	2,00	2,00	1,64
2	Standarisasi Nilai Indikator (%)	19,05	33,33	33,33	33,33	21,43
3	<i>Baseline</i> Nilai Indikator (%)	100	175,00	175,00	175,00	112,50

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber informasi Tabel 4.72, nilai pendapatan pekerja informal dari dana program bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan yang signifikan akibat banyaknya bantuan yang diterima masyarakat terdampak bencana pekerja informal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### **4.3.3 Strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah**

Guna menjawab permasalahan penelitian terkait strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah, Peneliti mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan menjadi 1 kategori utama, yakni indikator ketahanan daerah prioritas 7: pengembangan sistem pemulihan.

##### **4.3.3.1 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana**

Hasil pengolahan data pada sub sektor pengembangan sistem pemulihan bencana pada penelitian ini terdiri atas 2 (dua) indikator, yaitu

Indikator Perbaikan Rumah Penduduk dan indikator Pemulihan Penghidupan Masyarakat.

a. Indikator Perbaikan Rumah Penduduk

Pengembangan sistem pemulihan bencana di Kabupaten Lampung Selatan diawali dengan adanya perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami tahun 2018 melalui Surat Bupati Lampung Selatan No. 360/1070/VI.02/2019 Tertanggal 21 Maret 2019. Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan pemulihan pascabencana sektor permukiman dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 63.856.000.000,- yang terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 menggunakan anggaran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dari BNPB sebesar Rp. 26.600.000.000, sumber dana provinsi sebesar Rp. 3.650.000.000, dan sumber dana kabupaten sebesar Rp. 1.390.000.000. Adapun untuk bantuan isi rumah anggaran yang disediakan adalah Rp. 1.596.000.000, yang akan didanai dari kementerian/lembaga, kegiatan pendampingan pemulihan permukiman dengan jumlah kebutuhan senilai Rp. 2.620.000.000, dan kegiatan prasarana lingkungan dengan nilai kebutuhan sebesar Rp. 20.000.000.000, akan didanai dari hibah RR BNPB pada tahun 2019.

b. Indikator Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Sementara itu, indikator pemulihan penghidupan masyarakat ditandai dengan adanya perencanaan dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif. Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi produktif terdiri atas sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor

pariwisata, dan sub sektor koperasi/UKM, dan sub sektor perdagangan akan ditangani sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 143.754.664.000.

Sektor ekonomi produktif akan ditangani sesuai dengan kewenangan masing-masing anigara lain sub sektor perkebunan akan didanai malalui sumber dana kabupaten pada tahun 2020 dan sub sektor peternakan melalui sumber dana kementerian/lembaga pada tahun 2019. Sub sektor perikanan akan didanai dari kabupaten dan kementerian/lembaga pada tahun 2019 dan 2020, dan juga hibah RR BNPB pada tahun 2019.

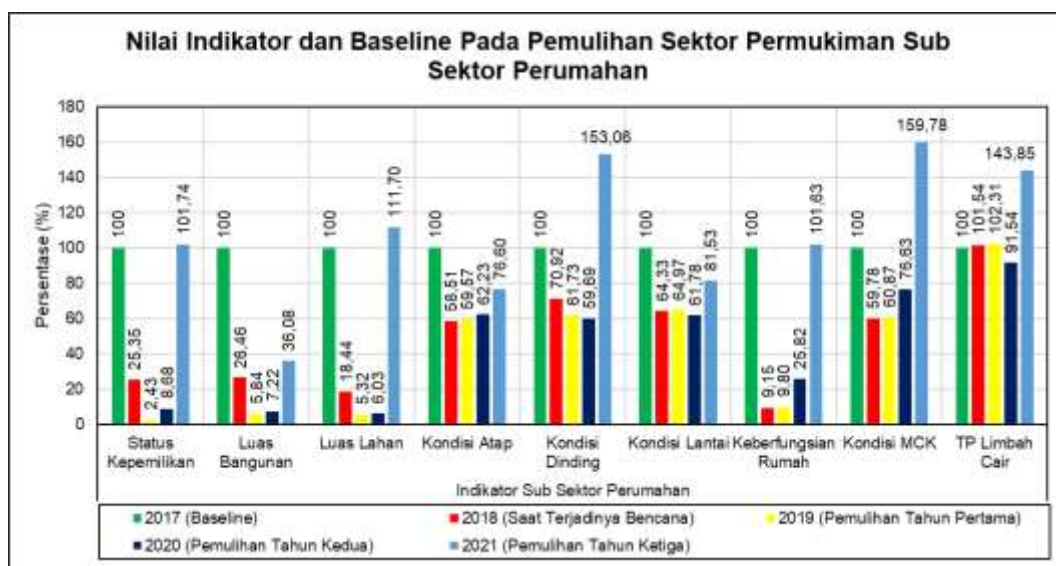
Sub sektor pariwisata akan didanai dari APBD Kabupaten Lampung Selatan, kementerian/lembaga dan dunia usaha/masyarakat pada tahun 2020. Sub sektor koperasi/UKM akan didanai dari APBD Kabupaten Lampung Selatan, APBD Provinsi Lampung, kementerian/Lembaga dan sumber lainnya (masyarakat dan dunia usaha) pada tahun 2020. Adapun untuk sub sektor perdagangan melalui sumber hibah RR BNPB pada tahun 2019.

#### **4.4 Hasil Analisis Data**

Hasil analisa data yang dilakukan Peneliti pada tahapan ini dimaksudkan agar data dapat memberikan makna yang sesuai guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti pada penelitian ini. Tahapan dalam hasil analisis data dilaksanakan setelah informasi atau data yang tersedia telah diolah melalui perhitungan terhadap indikator dalam setiap sektor permukiman dan ekonomi, kemudian Peneliti melakukan analisa terhadap data yang disajikan.

#### 4.4.1 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018

Berdasarkan rata-rata nilai semua indikator pada sektor permukiman maka didapatkan standarisasi nilai setiap indikator dan *baseline* pada pemulihan sektor permukiman sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan seperti yang terlihat pada Gambar 4.2 dan 4.3.



**Gambar 4.2 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Perumahan Sub Sektor Perumahan**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.2 menjelaskan bahwa masyarakat terdampak bencana tsunami selat sunda di Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerusakan pada sektor perumahan dengan kategori rusak berat, sehingga tidak dapat ditempati kembali. Hal ini dapat terlihat pada menurunnya beberapa indikator sektor perumahan pada tahun 2018 (tahun saat terjadinya bencana) dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya bencana (baseline 2017), seperti indikator status kepemilikan rumah, indikator luas bangunan rumah, indikator lahan dan pekarangan rumah, indikator kondisi

atap, dinding, dan lantai rumah, indikator keberfungsian rumah dan indikator kondisi MCK.

Hal yang menarik dari pemulihan sub sektor perumahan adalah adanya penurunan indeks pemulihan pada tahun 2019 dan 2020 dibandingkan indeks pada tahun terjadinya bencana (tahun 2018), seperti yang dapat dilihat pada indikator status kepemilikan rumah, indikator luas bangunan, dan indikator luas lahan. Hal ini berkaitan dengan status kepemilikan rumah dan lahan yang masih dimiliki oleh masyarakat pada tahun terjadinya bencana (tahun 2018), namun pada tahun 2019 dan 2020 masyarakat diminta untuk relokasi atas perumahan yang mereka tempati, yang penyerahannya baru terealisasi pada tahun 2021.

Selain itu, sub sektor prasarana lingkungan merupakan sub sektor yang melekat pada sektor permukiman yang terkena dampak akibat terjadinya bencana tsunami selat sunda tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa indikator dalam sub sektor prasarana lingkungan rusak pada saat terjadinya bencana, seperti indikator drainase (selokan) dan indikator penerangan jalan umum, seperti yang digambarkan pada Gambar 4.3 dibawah ini.



**Gambar 4.3 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Permukiman Sub Sektor Prasarana Lingkungan**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Sehingga berdasarkan nilai indikator dan baseline sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan di atas, didapatkan indeks pemulihan dan *baseline* pada pemulihan sektor permukiman secara keseluruhan seperti yang dapat diamati pada Gambar 4.4



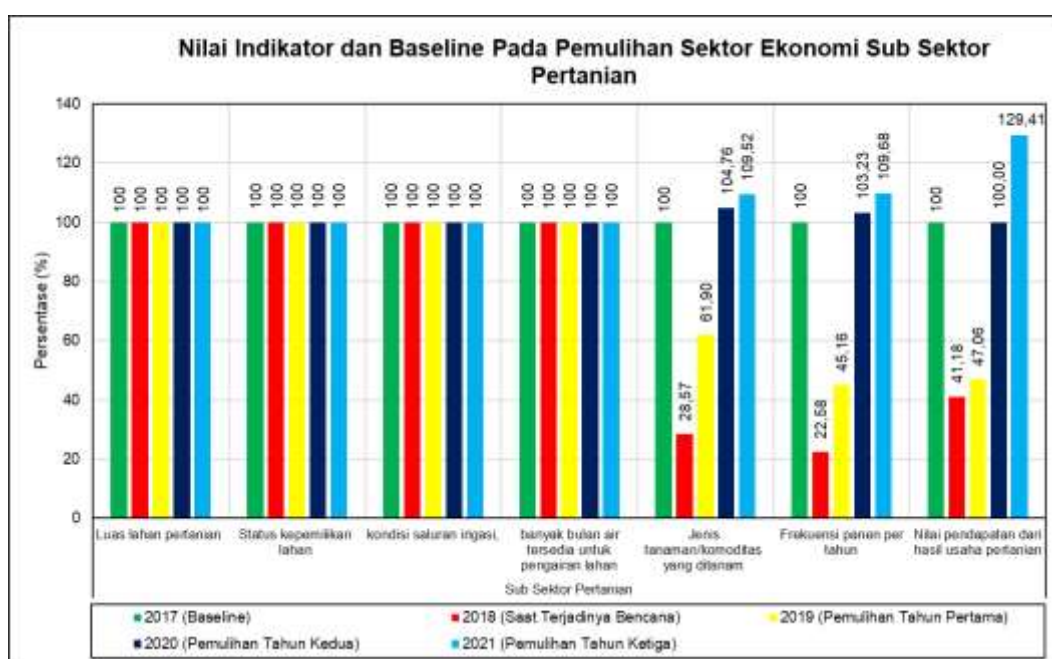
**Gambar 4.4 Indeks Pemulihan dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Permukiman**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.4 memberikan penjelasan bahwa indeks pemulihan pada sektor permukiman di dapatkan dari nilai semua indikator yang ada pada sub sektor perumahan dan sub sektor prasara lingkungan. Indeks pemulihan sektor permukiman mencapai kategori pulih pada pemulihan tahun ketiga setelah terjadinya bencana, yaitu pada tahun 2021 dengan nilai indeks pemulihan sektor permukiman sebesar 112,93 % dengan pemulihan sub sektor yang paling cepat pulih adalah sub sektor prasarana lingkungan dan yang paling lambat pulih adalah sub sektor perumahan.

#### 4.4.2 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018

Berdasarkan rata-rata nilai semua indikator pada sektor permukiman maka didapatkan standarisasi nilai setiap indikator dan baseline pada setiap sub sektor di pemulihan sektor ekonomi seperti yang terlihat pada Gambar 4.5 sampai dengan 4.12, yang kemudian secara keseluruhan indikator didapatkan indeks pemulihan sektor ekonomi yang dapat diamati pada gambar 4.13 .



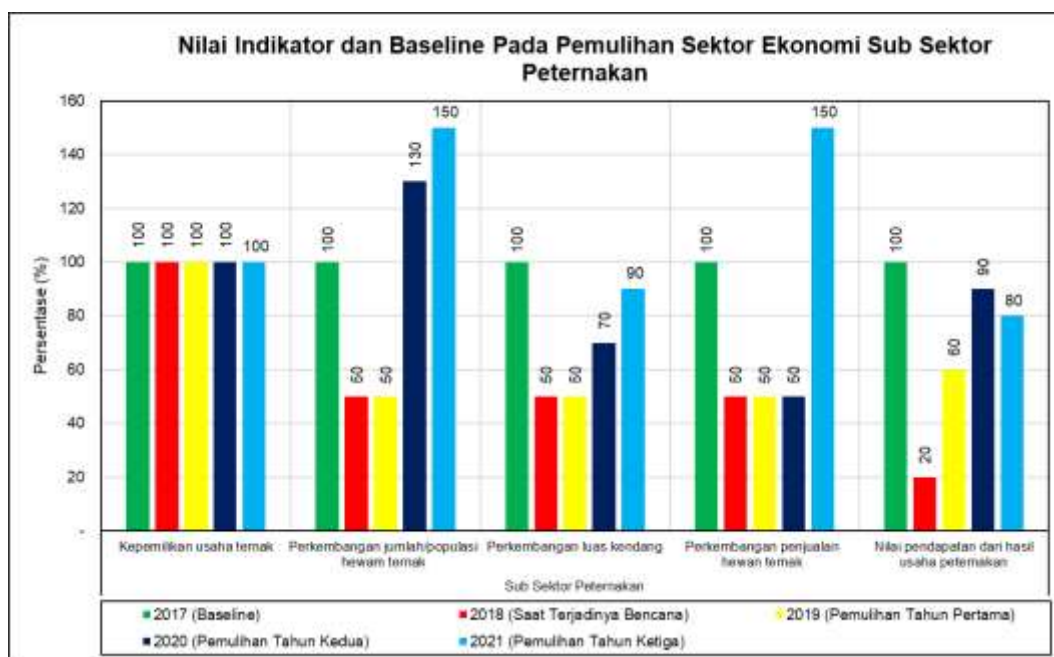
**Gambar 4.5 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.5 memerikan gambaran bahwa kejadian bencana tsunami selat sunda yang terjadi pada tahun 2018 tidak mempengaruhi beberapa indikator pada sub sektor pertanian, beberapa indikator tersebut meliputi indikator luas lahan pertanian, status kepemilikan lahan, kondisi saluran irigasi, dan indikator banyak bulan air yang tersedia untuk pengairan lahan pertanian. Namun beberapa indikator pada sub sektor pertanian yang bersifat dinamis mengalami penurunan secara drastis

dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya bencana (*baseline 2017*), seperti jenis tanaman atau komoditas yang ditanam, frekuensi panen per tahun, dan nilai pendapatan dari usaha pertanian.

Semua indikator yang bersifat dinamis pada sub sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan status pulih pada pemulihan tahun kedua setelah terjadinya bencana tsunami. Hal ini juga berlaku pada setiap indikator yang bersifat statis dan dinamis pada setiap indikator di sektor ekonomi sub sektor selain pertanian, seperti sub sektor peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian, pariwisata, hotel, dan restoran, serta sub sektor informal lainnya.

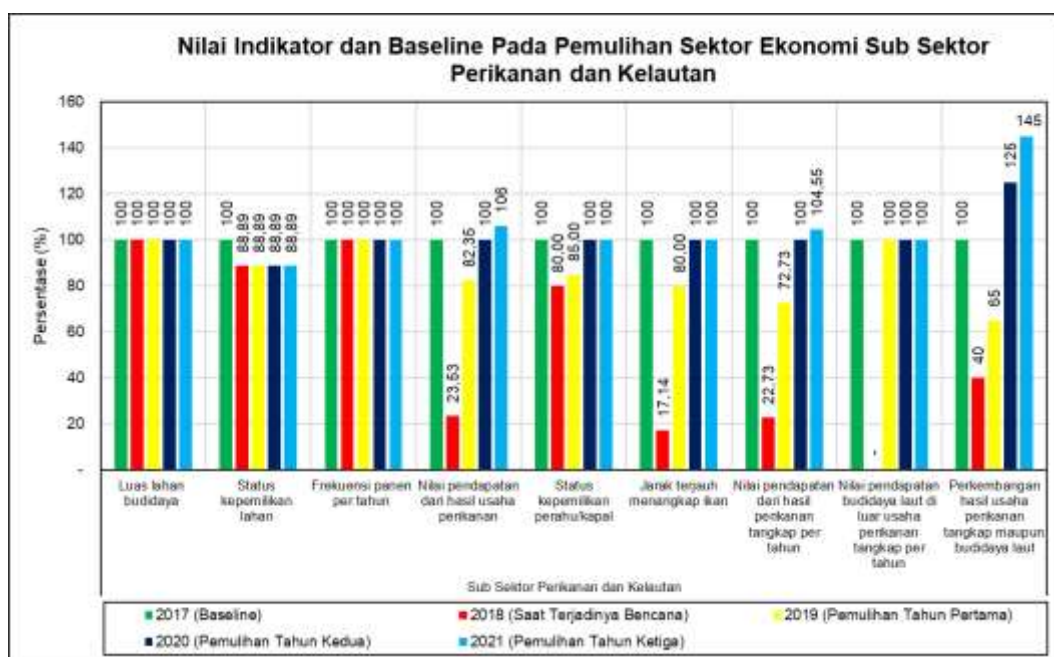


**Gambar 4.6 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Peternakan**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.6 menjelaskan bahwa pada indikator status kepemilikan usaha ternak yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan, indikator perkembangan jumlah dan luas kandang hewan ternak dalam sub sektor peternakan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun kedua (2020). Sedangkan indikator perkembangan penjualan hewan ternak dalam sub sektor peternakan

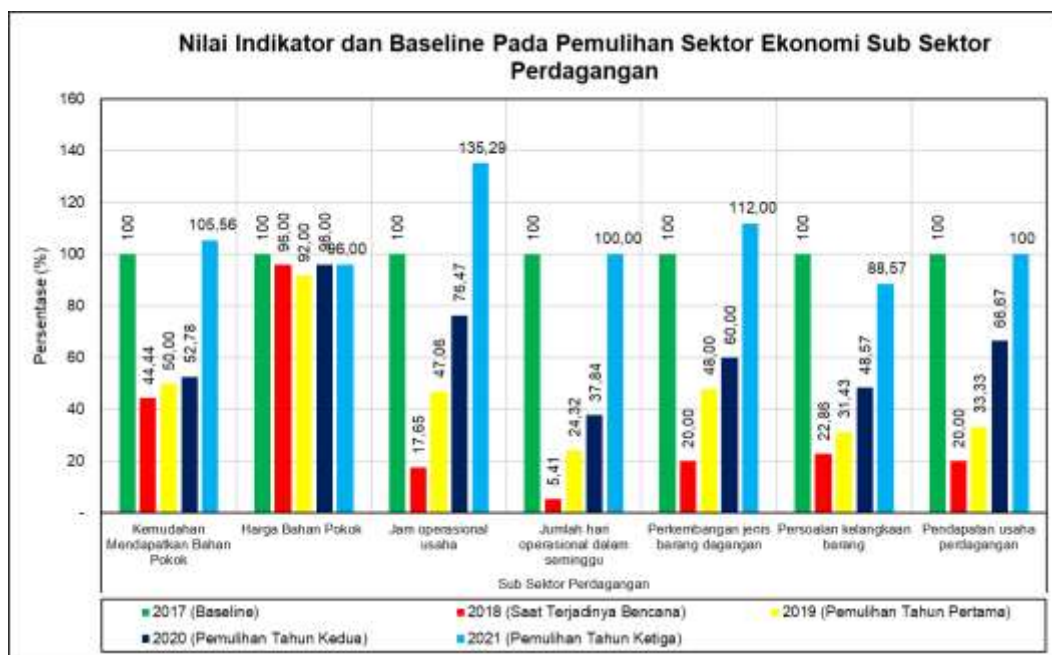
mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021) dan indikator nilai pendapatan usaha peternakan dalam sub sektor peternakan memiliki indeks mencapai indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017. Hal ini berarti bahwa pada tahun setelaha terjadinya bencana, masyarakat yang bekerja pada sub sektor peternakan mendapatkan penghasilan yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelum terjadinya bencana.



**Gambar 4.7 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.7 di atas memberikan pemahaman bahwa kejadian bencana tsunami tidak berdampak pada indikator luas lahan dan frekuensi panen budidaya perikanan yang dimiliki oleh masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa indikator pada sub sektor perikanan dan kelautan dinyatakan pulih pada pemulihan tahun kedua seperti indikator nilai pendapatan dari usaha perikanan dan kelautan, indikator status kepemilikan perahu, indikator jarak terjauh menangkap ikan, indikator pendapatan dari hasil perikanan tangkap, dan bahwa indikator perkembangan hasil usaha perikanan tangkap.

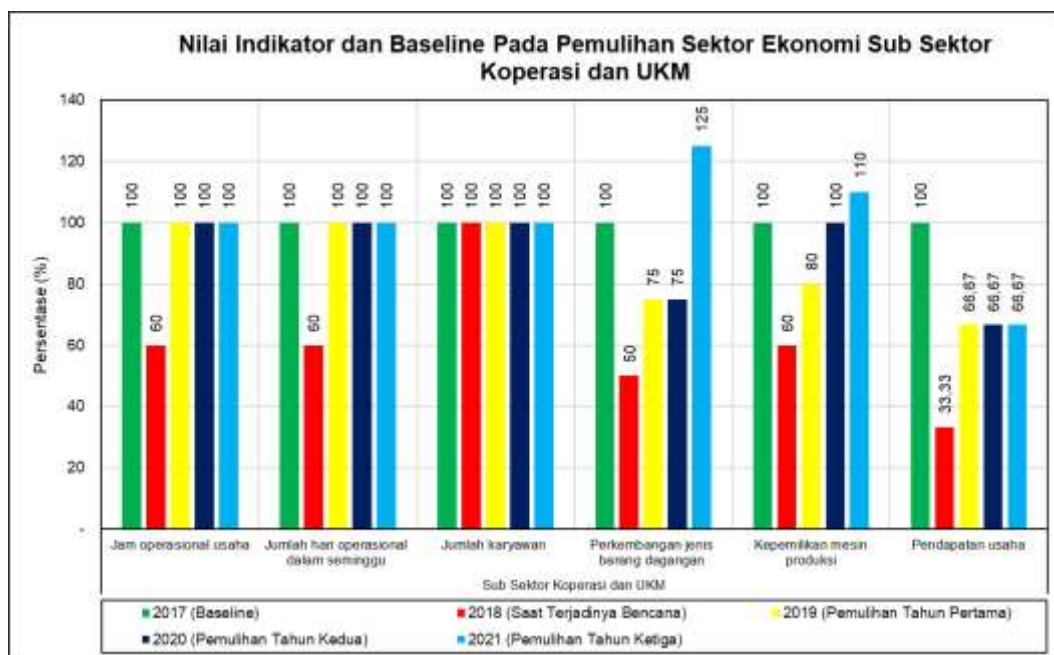


**Gambar 4.8 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Perdagangan**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Bersumber Gambar 4.8 di atas, peneliti memberikan arti bahwa indikator kemudahan mendapatkan bahan pokok dalam sub sektor perdagangan mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 (mencapai status pulih) pada saat pemulihan tahun ketiga (2021).

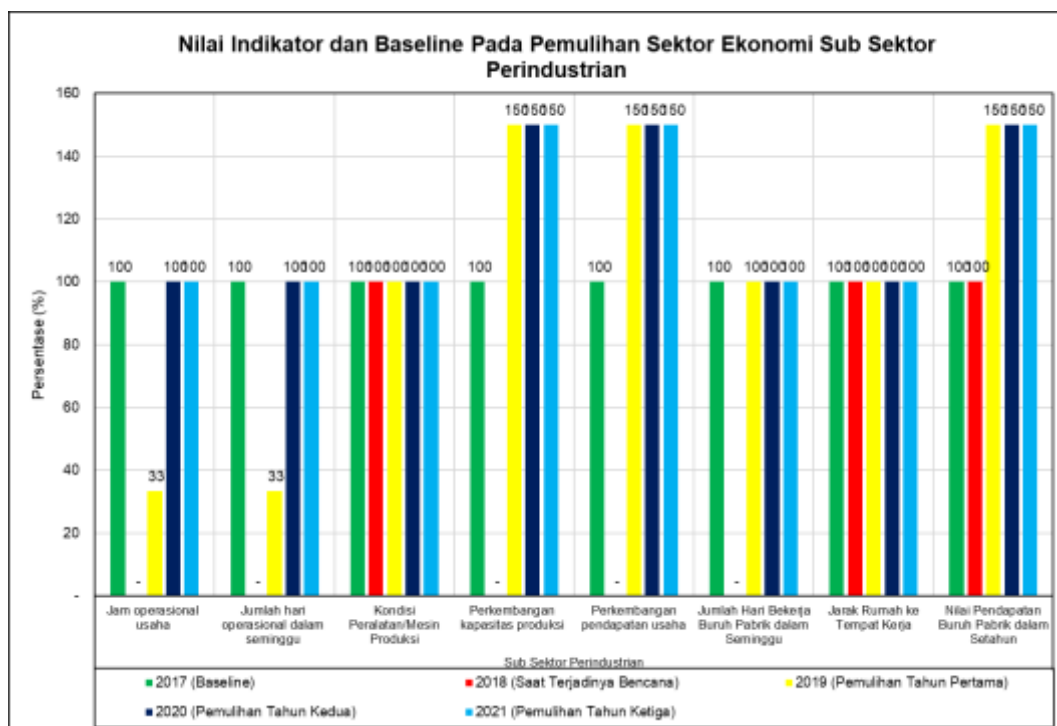
Indikator lain yang mencapai status pulih pada pemulihan tahun ketiga pada sub sektor perdagangan adalah indikator jumlah hari operasional usaha, indikator perkembangan jenis barang dagangan, dan indikator nilai pendapatan usaha perdagangan. Namun pada indikator kelangkaan barang dan indikator harga bahan pokok dalam sub sektor perdagangan memiliki indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017. Hal ini berarti bahwa harga bahan pokok pada tahun sebelum terjadinya bencana lebih murah dibandingkan dengan setelah terjadinya bencana.



**Gambar 4.9 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Sektor Koperasi dan UKM**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

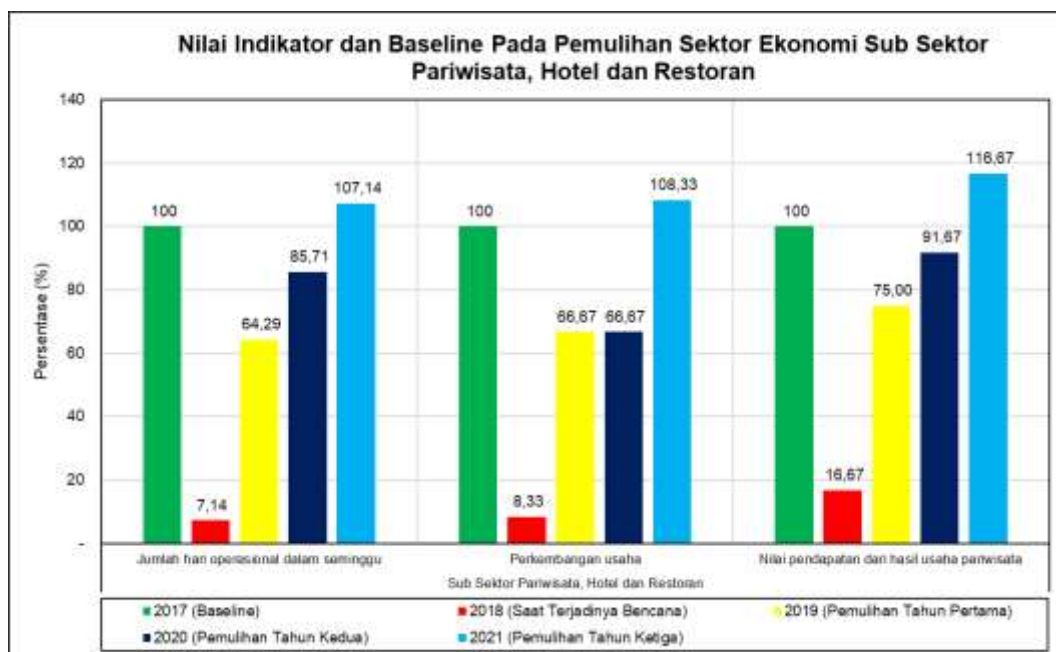
Informasi Gambar 4.9 memberikan pemaknaan terkait indikator jumlah karyawan yang terdapat dalam sub sektor koperasi dan UKM tidak terdampak akibat kejadian bencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan, dan terdapat 2 indikator yang pulih pada pemulihan tahun pertama, yaitu: indikator jam operasional usaha, dan indikator jumlah hari operasional dalam seminggu. Sedangkan indikator pendapatan usaha dalam sub sektor koperasi dan UKM memiliki indeks pemulihan yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline tahun 2017.



**Gambar 4.10 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Perindustrian**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

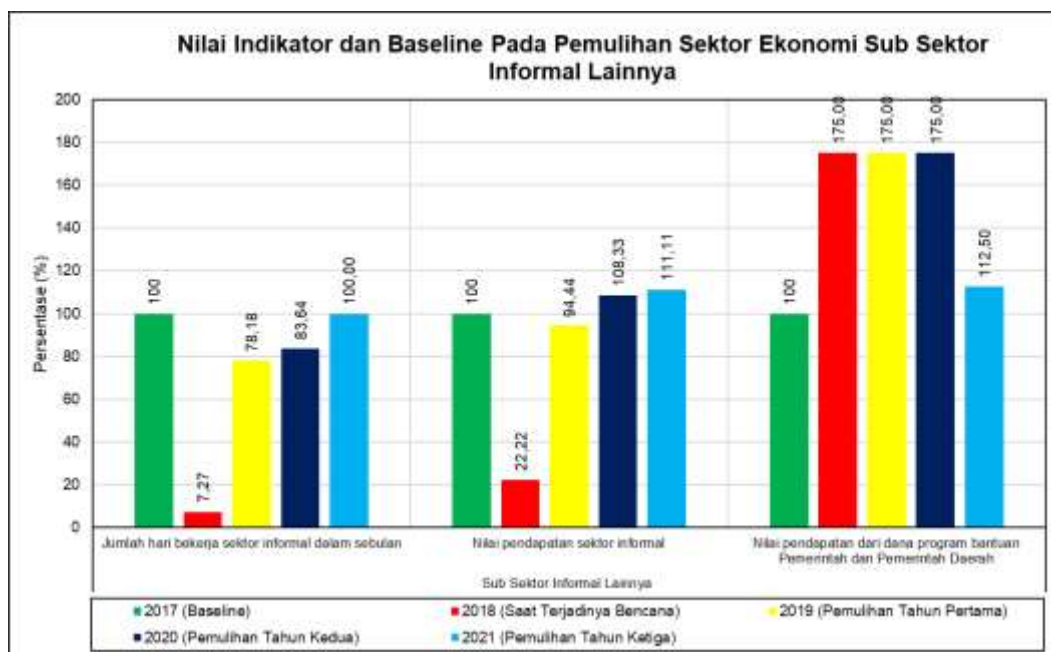
Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kondisi peralatan dan mesin produksi, serta indikator jarak rumah masyarakat yang bekerja dalam sub sektor perindustrian tidak terdampak kejadian bencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, beberapa indikator dinyatakan pulih pada pemulihan tahun kedua setelah kejadian bencana seperti bahwa indikator jam operasional usaha, indikator jumlah hari operasional usaha, indikator kapasitas produksi, indikator perkembangan pendapatan usaha, dan indikator jumlah hari bekerja buruh.



**Gambar 4.11 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pariwisata, Hotel dan Restoran**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.11 menjelaskan bahwa indikator jumlah hari operasional usaha dalam sub sektor pariwisata, hotel dan restoran mencapai indeks pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baseline tahun 2017 pada saat pemulihan tahun ketiga (2021), sehingga indikator lainnya yang berkaitan juga mengalami indeks pemulihan dengan status pulih yang sama pada pemulihan tahun ketiga, seperti indikator perkembangan usaha, dan indikator nilai pendapatan hasil usaha pariwisata, hotel, dan restoran.

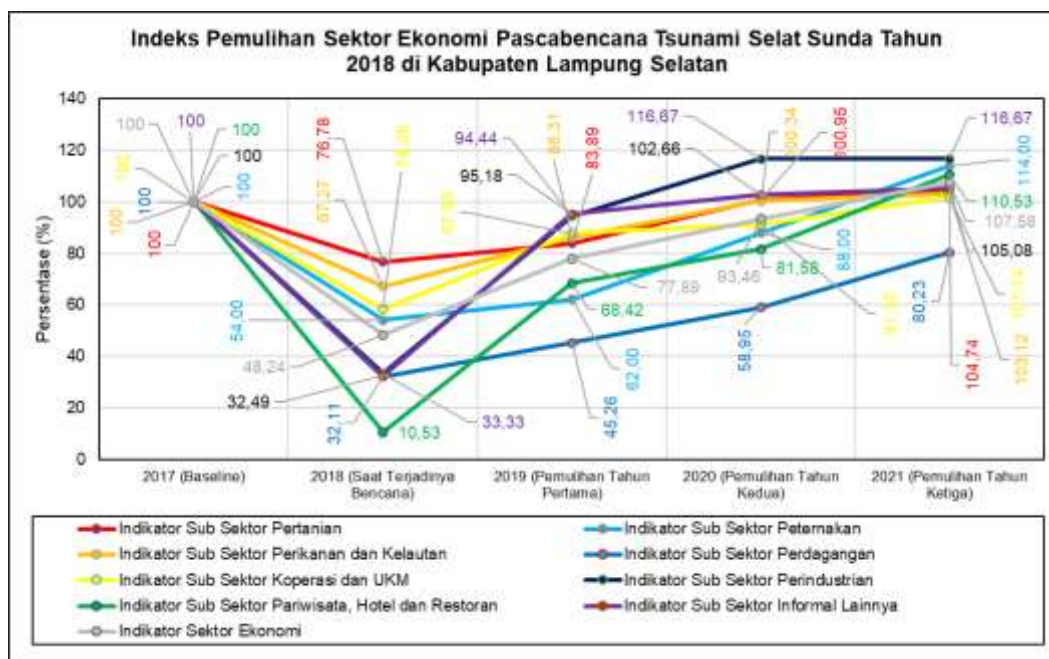


**Gambar 4.12 Nilai Indikator dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Informal Lainnya**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.12 menjelaskan bahwa nilai indikator pada sub sektor informal lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis, artinya tsunami berdampak signifikan pada masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sub sektor informal lainnya. Pada kondisi ini masyarakat hanya mendapatkan penghasilan (pendapatan ekonomi sub sektor informal lainnya) yang berasal dari dana bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga. Pada pemulihan tahun pertama (tahun 2019) hingga pemulihan tahun ketiga (tahun 2021) setelah terjadinya bencana, masyarakat terdampak tsunami yang menggantungkan hidupnya pada sub sektor informal lainnya perlahan mulai bekerja. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai indikator pada sub sektor informal lainnya, seperti indikator jumlah hari bekerja dan indikator nilai pendapatan sub sektor informal lainnya.

Sehingga secara keseluruhan nilai setiap indikator pada sub sektor perumahan dan prasarana lingkungan, di dapatkan indeks pemulihan dan baseline pada pemulihan sektor ekonomi seperti yang dapat diamati pada Gambar 4.13.



**Gambar 4.13 Indeks Pemulihan dan *Baseline* Pada Pemulihan Sektor Ekonomi**

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Gambar 4.13 memberikan arti bahwa pemulihan sektor ekonomi pasca terjadinya bencana tsunami selat sunda tahun 2018 di Kabupaten Lampung mengalami peningkatan indeks pemulihan setiap tahunnya dan secara keseluruhan pemulihan sektor ekonomi mendapatkan status pulih pada tahun 2021 dengan indeks pemulihan sektor ekonomi sebesar 107,58 %. Selain itu, Gambar 4.13 juga memberikan arti bahwa pemulihan paling cepat pada sektor ekonomi adalah sub sektor pertanian, sub sektor perikanan dan kelautan, dan sub sektor perindustrian, yang ketiganya pulih pada tahun kedua setelah terjadinya bencana. Pemulihan paling lambat sektor ekonomi adalah sub sektor peternakan, sub sektor koperasi dan UKM, dan sub sektor hotel, pariwisata dan restoran, yang ketiganya pulih pada tahun ketiga setelah terjadinya bencana. Hal yang menarik pada pemulihan ekonomi tersebut adalah adanya indikator pada sub sektor informal lainnya. Pekerja pada sub sektor informal lainnya mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup signifikan pada saat terjadinya bencana dan pada saat pemulihan pascabencana, dibandingkan dengan tahun

sebelum terjadinya bencana. Tambahan penghasilan tersebut seperti yang terlihat peningkatannya pada indikator nilai pendapatan dari program bantuan pemerintah dan pemerintah daerah.

#### **4.4.3 Strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat terlihat bahwa perencanaan dan pendanaan pelaksanaan pemulihan pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan merupakan bagian dari kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

Rencana program pemulihan pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD, dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait. Salah satu tujuan dari proses perencanaan ini adalah memastikan tidak terjadinya tumpang tindih pelaksanaan dan penganggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efisien

Sumber pendanaan pelaksanaan program pemulihan berasal dari APBN, APBD Provinsi Lampung, APBD Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya. Strategi ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tetap dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan

program pemulihan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, namun dalam hal APBD Kabupaten Lampung Selatan tidak memadai untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara keseluruhan, maka mekanisme bantuan seperti mekanisme hibah, partisipatif dunia usaha dan masyarakat perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

#### **4.5 Interpretasi Data**

Interpretasi data pada penelitian ini merupakan penggabungan hasil analisis data yang telah tersaji dengan kriteria indeks pemulihan yang telah dinormalisasikan, sehingga diketahui peningkatan persentase pemulihan permukiman dan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan pada setiap tahunnya mulai dari tahun sebelum bencana (*baseline*), tahun terjadinya bencana (tahun 2018), hingga 3 tahun setelah terjadinya bencana (tahun 2019 hingga tahun 2021). Serangkaian jawaban yang diperoleh nantinya diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan kategori data yang telah diolah dan dianalisa.

##### **4.5.1 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018**

Berdasarkan *baseline* (kondisi atau tahun sebelum terjadinya bencana) pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 di kabupaten lampung selatan, maka dapat diinterpretasikan bahwa status pemulihan pada tahun 2018 sebesar 42,29% dengan kategori belum pulih, 2019 sebesar 36,48% dengan kategori belum pulih, 2020 sebesar 43,96% dengan kategori belum pulih, dan 2021 sebesar 112,93% dengan kategori pulih. Berdasarkan data tersebut, maka *build back better and saver* pada sektor permukiman pada tahun 2021 dibandingkan dengan *baseline* tahun 2017 adalah 12,93%.

Angka pemulihan permukiman pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun sebelum terjadinya bencana mengalami penurunan sebesar -57,21 %, hal ini memberikan arti bahwa kerusakan sektor permukiman akibat bencana tsunami selat sunda tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan cukup parah, sehingga Pemerintah Daerah diharuskan melakukan beberapa program pemulihan terkait sektor permukiman di Kabupaten Lampung Selatan. Pemulihan sektor permukiman dimulai tahun pertama setelah terjadinya bencana tsunami tersebut (tahun 2019). Hal ini dapat dilihat pada peningkatan indeks pemulihan sektor permukiman pascabencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, hingga pada tahun 2021 indeks pemulihan tersebut mendapatkan kriteria pulih dengan indeks pemulihan permukiman sebesar 112,93%.

#### **4.5.2 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018**

Berdasarkan *baseline* (kondisi atau tahun sebelum terjadinya bencana) pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018 di kabupaten lampung selatan, maka dapat diinterpretasikan bahwa status pemulihan pada tahun 2018 sebesar 48,24% dengan kategori belum pulih, 2019 sebesar 77,89% dengan kategori belum pulih, 2020 sebesar 93,46% dengan kategori belum pulih, dan 2021 sebesar 107,58% dengan kategori pulih. Berdasarkan data tersebut, maka *build back better and saver* pada sektor permukiman pada tahun 2021 dibandingkan dengan *baseline* tahun 2017 adalah 7,58%.

Angka 48,24% pada tahun 2018 memberikan arti bahwa terjadi penurunan ekonomi akibat terjadinya bencana tsunami selat sunda di Kabupaten lampung selatan. Penurunan tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya bencana maka didapatkan penurunan ekonomi masyarakat sebesar -51,76 %. Artinya lebih dari 50% masyarakat tidak

dapat bekerja atau memperoleh penghidupan dikarenakan mereka terdampak tsunami dengan cukup berat.

Secara perlahan kenaikan indeks pemulihan dapat dilihat pada pemulihan tahun pertama setelah terjadinya bencana (tahun 2019) hingga 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana (tahun 2021). Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan sektor ekonomi mendapatkan status pulih, hal ini memberikan arti bahwa kehidupan dan penghidupan masyarakat telah pulih secara ekonomi, hal tersebut dapat dilihat pada setiap indikator pada sektor ekonomi, seperti masyarakat mulai bekerja kembali, peningkatan penghasilan (pendapatan ekonomi), dan indikator pariwisata yang mulai ramai, dan indikator lainnya dalam sektor ekonomi.

#### **4.5.3 Strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah**

Mekanisme pelaksanaan anggaran mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pemulihan pascabencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut. Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk pendanaan yang bersumber dari Kementerian/ Lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut

- 1) Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran
  - 2) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
- b. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Lampung dan APBD Kabupaten Lampung Selatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
- c. Pembiayaan yang menggunakan hibah RR BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran hibah RR BNPB.
- d. Pembiayaan hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan usulan bantuan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan
  - 2) BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan
  - 3) Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan untuk dapat mengalokasikan anggaran hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Surat usulan Kepala BNPB ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk

mengalokasikan anggaran hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

- 4) Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Surat Penetapan Pemberian hibah
- 5) Berdasarkan Surat Pemberitahuan hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian hibah antara Menteri Keuangan dan Bupati Lampung Selatan
- 6) PPA dan KPA hibah pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan hibah dari RKUN ke RKUD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Satker BPBD Kabupaten Lampung Selatan.

## **4.6 Pembahasan**

### **4.6.1 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018**

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam menentukan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 terbagi atas 2 sub sektor, yaitu sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan.

Indikator penelitian dalam sub sektor perumahan terdiri atas 9 (sembilan) indikator, yaitu status kepemilikan rumah, luas bangunan rumah, luas lahan, kondisi atap bangunan rumah, kondisi dinding bangunan rumah, kondisi lantai bangunan rumah, keberfungsian rumah, aktivitas dan kondisi sarana MCK, serta tempat pembuangan limbah cair. Sedangkan dalam sub sektor prasarana lingkungan terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu kondisi drainase/selokan di sekitar rumah, tempat pembuangan sementara (TPS)

sampah rumah tangga, kondisi penerangan jalan umum (PJU) di RT setempat

Sektor permukiman yang di dalamnya memuat sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan merupakan sektor yang paling utama dalam pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator di dalam sebagian sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan merupakan kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan, seperti terbangunnya hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 yang terbagi atas 2 sub sektor, yaitu sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan dapat di lihat pada Gambar 4.14.



**Gambar 4.14 Indeks Pemulihan Pada Pemulihan Sektor Permukiman**  
Sumber: Diolah oleh peneliti.

Pada penelitian ini, kriteria indeks pemulihan permukiman dikatakan pulih jika pemulihan tahun setelah terjadinya bencana lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya bencana (*baseline*). Berdasarkan Gambar 4.14 di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa status pemulihan sektor permukiman pada tahun 2018 sebesar 42,29 %

dengan kategori belum pulih, 2019 sebesar 36,48 % dengan kategori belum pulih, 2020 sebesar 43,96 % dengan kategori belum pulih, dan 2021 sebesar 112,93 % dengan kategori sudah pulih.

Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 yang dibuktikan dengan dicapainya indeks pemulihan permukiman dengan kategori pulih di tahun ketiga setelah terjadinya bencana menggambarkan bahwa hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia terkait penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Indonesia, seperti Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana yang menyatakan bahwa renaksi pemulihan suatu daerah pascabencana memiliki jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan indeks tersebut, maka *build back better and saver* pada sektor permukiman pada tahun 2021 adalah 12,93 % dengan pemulihan sub sektor yang paling cepat pulih adalah sub sektor prasarana lingkungan dan yang paling lambat pulih adalah sub sektor perumahan. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang ada pada Tabel 2.1, maka hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suriastini et al., (2020), yaitu pemulihan pascabencana pada sektor permukiman menggunakan *Disaster Recovery Index* (DRI) atau indikator yang terdiri atas sub sektor perumahan, dan sub sektor prasarana lingkungan.

Terdapatnya peningkatan tingkat pemulihan (*build back better and saver*) pada sektor permukiman di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Kapasitas dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pemulihan sektor permukiman yang telah dikeluarkan oleh BNPB dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman. Inti dari pembentukan regulasi ini adalah memberikan

dasar hukum dalam sektor permukiman sebagai bagian dari membangun kembali daerah pascabencana menjadi lebih baik dan lebih aman (*build back better and safer*).

Program pemulihan pascabencana pada sektor permukiman yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak menggunakan prinsip kontraktual, melainkan menggunakan sistem swadaya masyarakat. Sistem swadaya masyarakat tersebut menekankan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) bersama masyarakat terdampak, bertanggung jawab pada setiap program pemulihan pascabencana sektor permukiman. Pemulihan sektor ini, terlebih perumahan harus menjadi yang utama dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal, pemulihan dilakukan sesuai waktunya, mempunyai perencanaan yang baik, terpadu, koordinator dan berkelanjutan terhadap RPD, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan hunian tetap yang responsif ancaman bencana dalam upaya pembangunan yang lebih baik dan aman yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

#### **4.6.2 Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018**

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam menentukan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018 terbagi atas 8 (delapan) sub sektor, yaitu sub sektor pertanian, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan dan kelautan, sub sektor perdagangan, sub sektor koperasi dan ukm, sub sektor perindustrian, sub sektor pariwisata, hotel dan restoran, dan sub sektor informal lainnya.

Indikator penelitian dalam sub sektor pertanian terdiri atas 7 (tujuh) indikator, yaitu luas lahan pertanian, status kepemilikan lahan, kondisi saluran irigasi, banyak bulan air tersedia untuk pengairan lahan, jenis tanaman/komoditas yang ditanam, frekuensi panen per tahun, nilai

pendapatan dari hasil usaha pertanian. Perhitungan pada sub sektor peternakan terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu kepemilikan usaha ternak, perkembangan jumlah/populasi hewan ternak, perkembangan luas kandang, perkembangan penjualan hewan ternak, dan nilai pendapatan dari hasil usaha peternakan.

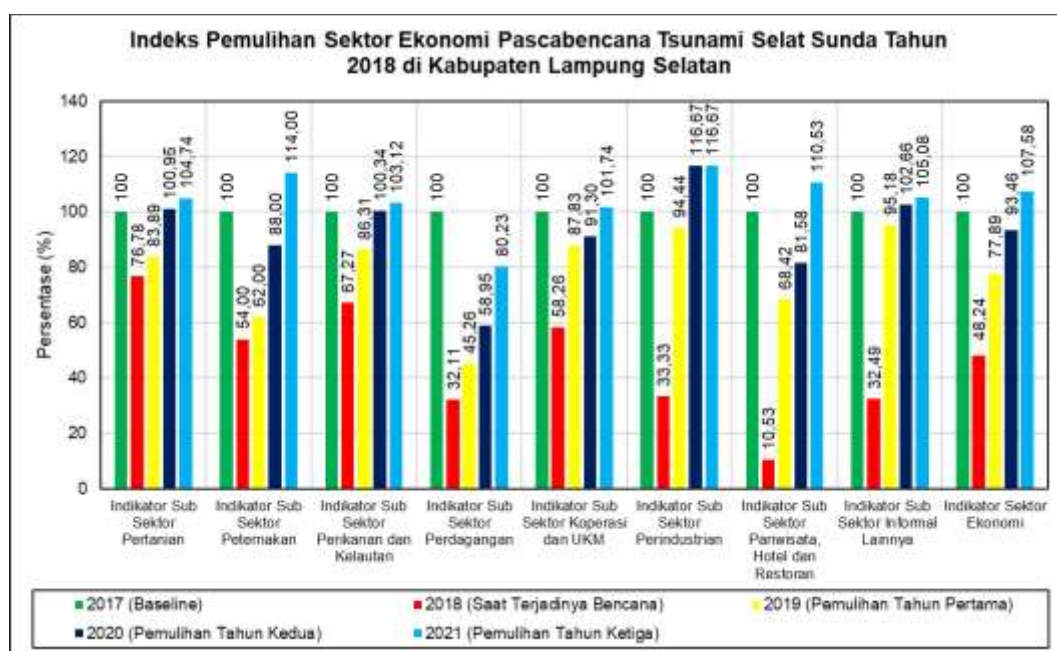
Secara umum perhitungan pada sub sektor perikanan dan kelautan terdiri atas 2 (dua) jenis usaha, yaitu usaha budidaya perikanan dan usaha perikanan tangkap (nelayan). Jenis usaha budidaya perikanan terdiri atas 4 (empat) indikator, yaitu luas lahan budidaya, status kepemilikan lahan frekuensi panen per tahun, dan nilai pendapatan dari hasil usaha perikanan. Sedangkan pada jenis usaha perikanan tangkap terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu status kepemilikan perahu/kapal, jarak terjauh menangkap ikan, nilai pendapatan dari hasil perikanan tangkap per tahun, nilai pendapatan budidaya laut di luar usaha perikanan tangkap, dan perkembangan hasil usaha perikanan tangkap maupun budidaya laut.

Perhitungan pada sub sektor perdagangan terdiri atas 7 (tujuh) indikator, yaitu kemudahan mendapatkan bahan pokok, harga bahan pokok, jam operasional usaha, jumlah hari operasional dalam seminggu, perkembangan jenis barang dagangan, persoalan kelangkaan barang, dan pendapatan usaha perdagangan. Perhitungan pada sub sektor koperasi dan UKM terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu jam operasional usaha, jumlah hari operasional dalam seminggu, jumlah karyawan, perkembangan jenis barang dagangan, kepemilikan mesin produksi, dan pendapatan usaha. Perhitungan pada sub sektor perindustrian terdiri atas 8 (delapan) indikator, yaitu jam operasional usaha, jumlah hari operasional dalam seminggu, kondisi peralatan/mesin produksi, perkembangan kapasitas produksi, perkembangan pendapatan usaha, jumlah hari bekerja buruh pabrik dalam seminggu, jarak rumah ke tempat kerja, nilai pendapatan buruh pabrik dalam setahun.

Perhitungan pada sub sektor pariwisata, hotel dan restoran terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu jumlah hari operasional dalam seminggu,

perkembangan usaha, dan nilai pendapatan dari hasil usaha pariwisata. Perhitungan pada sub sektor informal lainnya terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu jumlah hari bekerja sektor informal dalam sebulan, nilai pendapatan sektor informal, dan nilai pendapatan dari dana program bantuan pemerintah dan pemerintah daerah.

Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan ekonomi pascabencana tsunami tahun 2018 yang terbagi atas 8 sub sektor, yaitu yaitu sub sektor pertanian, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan dan kelautan, sub sektor perdagangan, sub sektor koperasi dan ukm, sub sektor perindustrian, sub sektor pariwisata, hotel dan restoran, dan sub sektor informal lainnya dapat dilihat pada Gambar 4.15.



**Gambar 4.15 Indeks Pemulihan Pada Pemulihan Sektor Ekonomi**  
Sumber: Diolah oleh peneliti.

Pada penelitian ini, kriteria indeks pemulihan ekonomi dikatakan pulih jika pemulihan tahun setelah terjadinya bencana ( $t+1$ ,  $t+2$ , dan  $t+3$ ) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya bencana (*baseline*). Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa status pemulihan sektor ekonomi pada tahun 2018 sebesar 48,24 %

dengan kategori belum pulih, 2019 sebesar 77,89 % dengan kategori belum pulih, 2020 sebesar 93,46 % dengan kategori belum pulih, dan 2021 sebesar 107,58 % dengan kategori sudah pulih. Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam program pemulihan permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 yang dibuktikan dengan dicapainya indeks pemulihan permukiman dengan kategori pulih di tahun ketiga setelah terjadinya bencana menggambarkan bahwa hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia terkait penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Indonesia, seperti Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana yang menyatakan bahwa renaksi pemulihan daerah pascabencana memiliki batas maksimal atau batas waktu paling banyak 3 tahun pemulihan.

Berdasarkan indeks tersebut, maka *build back better and saver* pada sektor ekonomi pada tahun 2021 adalah 7,58 % dengan pemulihan paling cepat pada sektor ekonomi adalah sub sektor pertanian, sub sektor perikanan dan kelautan, dan sub sektor perindustrian, yang ketiganya pulih pada tahun kedua setelah terjadinya bencana. Pemulihan paling lambat sektor ekonomi adalah sub sektor peternakan, sub sektor koperasi dan UKM, dan sub sektor hotel, pariwisata dan restoran, yang ketiganya pulih pada tahun ketiga setelah terjadinya bencana, yang kesemuanya berkaitan erat dengan empat indikator dukungan pascabencana, yaitu layanan publik, pasar, pekerjaan dan bantuan keuangan publik. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang peneliti kutip pada Tabel 2.1 bahwa prioritas pemulihan pascabencana berkaitan erat dengan empat kondisi sosial utama terkait dukungan bencana, yaitu: layanan publik, pasar, pekerjaan dan bantuan keuangan publik. Terdapatnya peningkatan tingkat pemulihan (*build back better and saver*) pada sektor permukiman di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Kapasitas dalam program pemulihan

permukiman pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa indikator capaian dalam pemulihan sektor ekonomi pascabencana memiliki 4 indikator capaian, yaitu: terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga, terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga, meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga dan meningkatnya jumlah pendapatan anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.

#### **4.6.3 Strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah**

Pemulihan pascabencana yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan permasalahan sendiri. Hal ini dikarenakan pemulihan pascabencana menjadi sulit dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan strategi peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah salah satunya adalah pengembangan sistem pemulihan pascabencana. Hal yang menarik dari pemulihan permukiman di Kabupaten Lampung Selatan adalah menggunakan konsep swadaya masyarakat tipe IV. Konsep ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan konsep kontraktual, seperti yang peneliti dalam penelitian ini sarikan pada Tabel 4.73.

**Tabel 4.73 Perbandingan Sistem Kontraktual dan Swadaya Masyarakat Tipe IV**

No	Indikator	Kontraktual	Swadaya Masyarakat Tipe IV
1	Sumber Daya Manusia	Terdapat Konsultan Perencana, Kontraktor melaksanakan hasil rancangan	Terdapat Kelompok Masyarakat, dan fasilitator dari Pemerintah
2	Anggaran	Terdapat PPh Jasa Konstruksi, dan berorientasi pada keuntungan pihak ketiga	Tidak Terdapat Potongan Pajak, sehingga penggunaannya lebih efisien dan tidak berorientasi pada keuntungan pihak ketiga
3	Kualitas	Diutamakan	Diutamakan
4	Operasional dan Pemeliharaan	Sesuai masa kontrak atau perjanjian	Pemeliharaan secara berkelanjutan

Sumber: (Oktovyanti, 2015; Diolah Oleh Peneliti).

Tabel 4.73 memberikan arti bahwa konsep swadaya masyarakat tipe IV memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem kontraktual, diantaranya yaitu jika ditinjau dari segi anggaran, maka swadaya masyarakat lebih unggul dibandingkan dengan kontraktual, hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, tidak adanya potongan pajak penghasilan jasa konstruksi (PPh Jasa Konstruksi), dan tidak berorientasi pada profit. Berdasarkan segi operasional dan pemeliharaan, sistem swadaya masyarakat tipe IV dinilai unggul karena waktu lebih longgar dan tidak terdapat sanksi sedangkan kontraktor terdapat sanksi keterlambatan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak dan yang paling penting adalah adanya pemeliharaan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Hal ini disamping memaksimalkan potensi masyarakat dalam menempti, menjaga, dan memelihara permukiman yang telah di dapatkan, namun juga memaksimalkan sumber daya anggaran yang dimiliki, karena penggunaan konsep swadaya masyarakat menitikberatkan pada pelibatan masyarakat sebagai *end to end* penanggulangan bencana, sehingga dana bantuan pembangunan rumah sederhana dapat secara penuh diterima oleh

masyarakat tanpa adanya potongan maupun pajak dari pihak ketiga (kontraktual). Suaib (2017) juga menyatakan bahwa pemulihan yang baik pada dasarnya lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada inisiatif, prakarsa masyarakat, kearifan lokal dan gotong royong untuk membuka lapangan kerja (Suaib, 2017). Pada Tabel 4.74 akan peneliti sarikan daftar regulasi program pemulihan pascabencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan.

**Tabel 4.74 Daftar Regulasi Program Pemulihan Pascabencana Tsunami Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Selatan**

No	Regulasi	Keterangan
1	SK Bupati Lampung Selatan No. B/400/VI.02/HK/2018	Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan
2	SK Bupati Lampung Selatan No. B/405/VI.02/HK/2018	Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan
3	SK Bupati Lampung Selatan No. B/30/VI.02/HK/2019	Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan
4	SK Bupati Lampung Selatan No. B/125/VI.02/HK/2019	Penetapan Status Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan
5	Surat Bupati Lampung Selatan No. 360/1070/VI.02/2019	Permohonan Rekomendasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
6	SK Bupati Lampung Selatan No. B/613.1/VI.02/HK/2019	Penetapan Tim Perencanaan Dan Pendataan Tanah Serta Tim Inventarisasi Tanah Lahan Hunian Tetap Korban Bencana Tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan
7	Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/375.1/VI.02/HK/2020 Tahun 2020	Penetapan Daftar Penerima Bantuan Hunian Tetap (HUNTAP) Rumah Sederhana Korban Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui program pemulihan pascabencana tsunami guna mewujudkan ketahanan daerah sejatinya merupakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pengembangan sistem pemulihan bencana di daerah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021). Hal ini kembali ditegaskan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa manajemen bencana yang dilakukan adalah

manajemen terhadap risiko bencana melalui etika pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Bencana merupakan salah satu ancaman non militer dinilai dapat meluluhlantakkan berbagai aspek kehidupan berbangsa apabila tidak diimbangi dengan kapasitas ketahanan daerah yang tinggi (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Hal ini sesuai dengan perhitungan indeks risiko bencana Indonesia dapat diturunkan melalui penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas. Berdasarkan IRBI BNPB bahwa Komponen peningkatan kapasitas tersebut dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas, yang salah satunya adalah pengembangan sistem pemulihan bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).

Berdasarkan Tabel 4.73, dapat diketahui bahwa strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dimulai dengan adanya sistem pemulihan pascabencana yang tergambar pada Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/400/VI.02/HK/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan hingga terbitnya Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/375.1/VI.02/HK/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Hunian Tetap (HUNTAP) Rumah Sederhana Korban Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan dengan pembiayaan anggaran pemulihan sektor ekonomi yang tidak hanya memberatkan APBD Kabupaten Lampung Selatan, namun juga melibatkan anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (APBN) dari BNPB, bantuan pembiayaan dari APBD Provinsi, dan Bantuan pemulihan sektor permukiman dan ekonomi dari pihak ketiga seperti universitas, badan usaha, dan pihak swasta, yang kesemua pemulihannya menggunakan sistem swadaya masyarakat.